

Dr. Sukezi, MM.

Lansia berkualitas

Pemberdayaan Lansia sebagai bentuk program prioritas pemerintah, salah satunya melalui perwujudan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lanjut Usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Provinsi Jawa Timur melalui PERDA Nomor 5 Tahun 2007 tentang “Kesejahteraan Lanjut Usia” yang diiringi dengan meningkatnya jumlah pelayanan dan fasilitas untuk penduduk Lansia dengan salah satu harapan para Lansia dapat beraktualisasi sesuai dengan kemampuannya, bisa berdaya dan mandiri sehingga hari-harinya hidup berkualitas. Dalam pembahasan ini, penulis sampaikan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA yang pada akhirnya dapat menyusun buku LANSIA BERKUALITAS.

2011



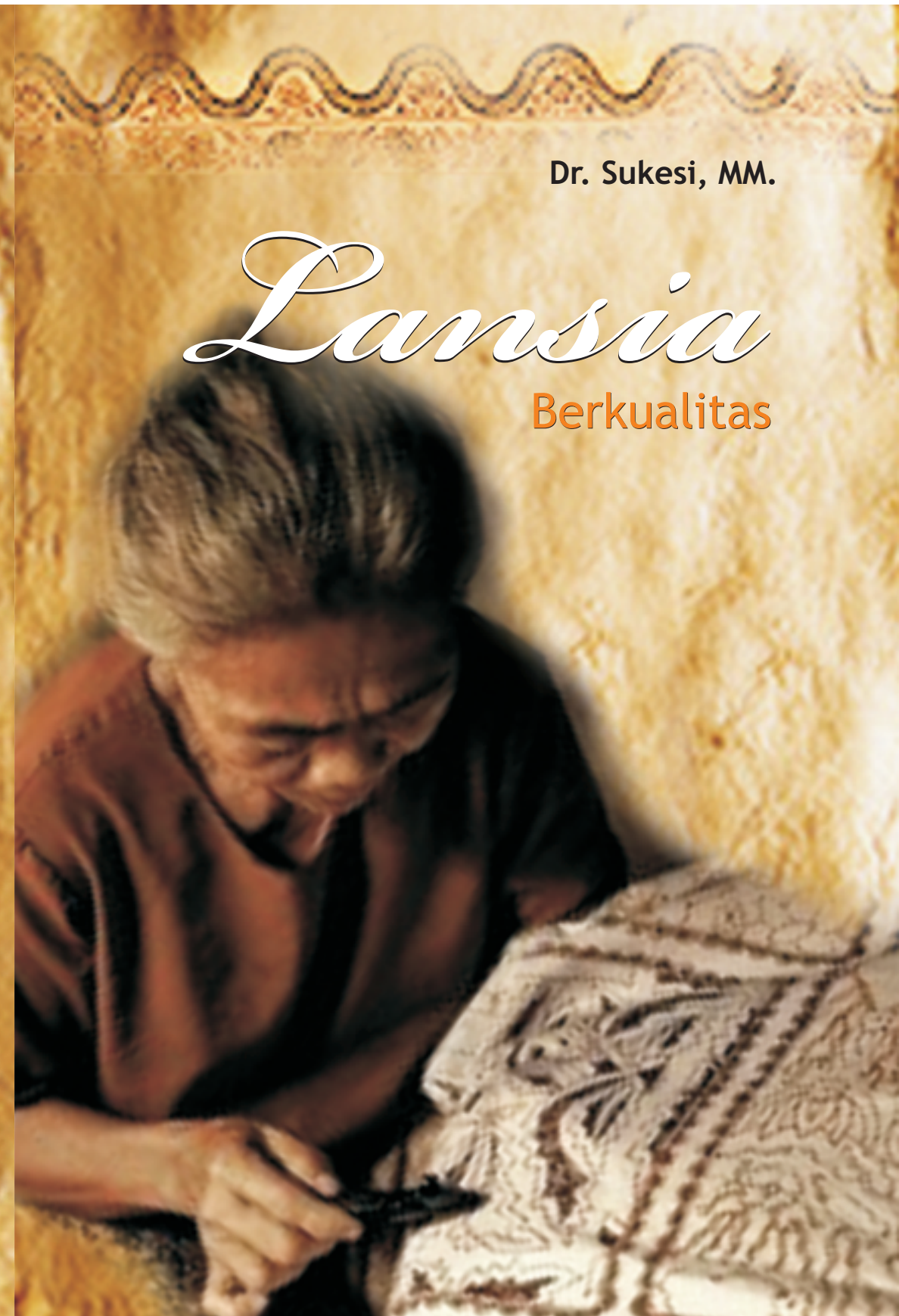
LANSIA BERKUALITAS

Dr. Sukezi, MM.

2011

Dr. Sukezi, MM.

Lansia Berkualitas



LANSIA BERKUALITAS

Oleh:
Dr. Sukesi, MM.

Tahun
2011

LANSIA BERKUALITAS

Oleh:
Dr. Sukesu, MM

Desain/Layout
Rani Rubby

Tahun
2011

Lansia **Berkualitas**

Oleh:
Dr. Sukesu, MM

Lutfansah Mediatama

LANSIA BERKUALITAS

Penulis: Dr. Sukei, MM

Desain Layout: ranyrubby

Penerbit:

Lutfansah Mediatama

Jl. Darmokali I/ 11 Surabaya

Telp. 031 5611263

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Cetakan I, Pebruari 2011

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Lansia Berkualitas/ Oleh Sukei, -- Surabaya: Lutfansah
Mediatama 2011.

x + 96 hlm.; 15,5 x 23 cm.

ISBN : 978-602-8625-30-2

Kata Pengantar

Salah satu kebutuhan membangun rasa percaya diri Lansia sebagai modal bersosialisasi di masyarakat yang lebih luas, untuk meningkatkan kemandirian sehingga hidup akan lebih berkualitas merupakan tanggung jawab kita semua. Pemberdayaan Lansia sebagai bentuk program prioritas pemerintah, salah satunya melalui perwujudan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para Lanjut Usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Provinsi Jawa Timur melalui PERDA Nomor 5 Tahun 2007 tentang “Kesejahteraan Lanjut Usia” yang diiringi dengan meningkatnya jumlah pelayanan dan fasilitas untuk penduduk Lansia dengan salah satu harapan para Lansia dapat beraktualisasi sesuai dengan kemampuannya, bisa berdaya dan mandiri sehingga hari-harinya hidup berkualitas.

Penulis sampaikan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA yang pada akhirnya dapat menyusun buku Lanjut Usia Berkualitas atau disingkat LANSIA Berkualitas.

Buku LANSIA Berkualitas ini merupakan hasil kajian dari studi lapangan yang merupakan adanya beberapa masalah yang muncul terkait Pemberdayaan Lansia, kemudian analisis disertai penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan kajian, metodologi, hasil data yang didapat dari responden dilanjutkan analisis dan pembahasan, strategi kegiatan dalam pemberdayaan Lansia, kesimpulan saran, dan beberapa rekomendasi kegiatan yang ditindaklanjuti.

Selanjutnya, disadari adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki oleh tim penyusun laporan, oleh karena penulis mengharapkan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini.

Kata Pengantar

Dan pada kesempatan ini tidak lupa pula di sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini hingga selesai.

Surabaya, Pebruari 2011
Penulis

Lansia Berkualitas
Daftar Isi

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Kegiatan	5
1.3. Tujuan, Manfaat dan Sasaran Kegiatan	5
1.3.1. Tujuan Kegiatan	5
1.3.2. Manfaat Kegiatan	6
1.3.3. Sasaran Kegiatan	6
 BAB II TINJAUAN TEORI	 7
2.1. Dasar Hukum Pemberdayaan Lansia	7
2.2. Konsep Pemberdayaan	8
2.2.1. Pemberdayaan Lanjut Usia	10
2.2.2. Kebutuhan Lanjut Usia	12
2.2.3. Kendala Pemberdayaan Lansia	14
2.2.4. Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin	16
2.2.5. Pendekatan Dalam Pemberdayaan	17
2.2.6. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	17
2.2.7. Langkah-langkah Proses Pemberdayaan	18
2.2.8. Strategi Pemberdayaan	18
2.3. Kerangka Berfikir Kegiatan	20
2.4. Rekomendasi Penelitian Sebelumnya	21
 BAB III METODE KEGIATAN	 23
3.1. Jenis Kegiatan	23
3.2. Pendekatan Kegiatan	23

3.3.	Operasional Variabel	24
3.4.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1.	Jenis Data	24
3.4.2.	Sumber Data	24
3.4.3.	Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.	Lokasi Kegiatan	26
3.6.	Populasi Dan Penentuan Sampel	26
3.7.	Teknis Dan Analisa Data	26
3.7.1.	Kompilasi Data	27
3.7.2.	Analisis Data	27
BAB IV	DISKRIPSI KONDISI EKSISTING	28
4.1.	Administratif Kota Surabaya	29
4.1.1.	Kondisi Geografis	29
4.1.2.	Penduduk	31
4.1.3.	Perekonomian Daerah	31
4.1.4.	Pembangunan dan Prasarana Jalan	33
4.1.5.	Sosial Budaya Daerah	34
4.1.6.	Pendidikan	34
4.1.7.	Kesehatan	36
4.2.	Gambaran Wilayah Kegiatan	36
4.2.1.	Kecamatan Kenjeran	36
4.2.2.	Gambaran Lokasi Kelurahan Tanah Kalikedinding	38
4.2.3.	Kecamatan Tegalsari	43
4.2.4.	Gambaran Lokasi Kelurahan Wonorejo	44
4.3.	Program Lanjut Usia Kota Surabaya	50
4.4.	Profil Lanjut Usia Binaan Kota Surabaya	53
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1	Mengidentifikasi Lansia Miskin Dan Keluarga (Prioritas Program Pemberdayaan) Kota Surabaya	55
5.2.	Mengidentifikasi Persyaratan Teknis Manajemen Dan Kelembagaan Dari Berbagai Kegiatan Ekonomi Yang Layak Dijadikan Prioritas	58

5.2.1.	Kondisi Ekonomi Lansia dan Kegiatannya	58
5.2.2.	Kegiatan Ekonomi yang Layak Dijadikan Prioritas	64
5.3.	Fungsional Strategik Kegiatan Ekonomi Layak Dijadikan Prioritas Utama Dan Tugas Unit-unit Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Pelaksana	65
5.3.1.	Fungsi Strategik Kegiatan Ekonomi	65
5.3.2.	Peran Pemerintah	70
5.3.3.	Tugas Unit-unit Pemerintah Kota	73
5.4.	Mengidentifikasi Dan Merancang Program-Program Prioritas Pendukung Bagi Pemberdayaan Lansia Dan Keluarganya	76
5.4.1.	Identifikasi Pemberdayaan Lansia	76
5.4.2.	Identifikasi Pemberdayaan Keluarga Lansia	77
BAB VI	RANCANGAN STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	79
6.1.	Strategi Dan Kebijakan	79
6.1.1.	Strategi	79
6.1.2.	Kebijakan	80
6.2	Program dan Kegiatan	80
BAB VII	PENUTUP	83
7.1.	Kesimpulan	83
7.2.	Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN		91

Daftar Tabel

Tabel

4.1.	Menurut Penggunaan	38
4.2.	Data Penduduk Berdasarkan KK, Jiwa, Usia dan Pekerjaan	39
4.3.	Mata Pencaharian Pokok	40
4.4.	Unit Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha di Wilayah Kelurahan	40
4.5.	Akses Sarana Transportasi Darat	40
4.6.	Prasarana Air Bersih	41
4.7.	Prasarana Sanitasi	41
4.8.	Prasarana Kesehatan	41
4.9.	Sarana Kesehatan	42
4.10.	Perkembangan Sarana dan Sarana Kesehatan Masyarakat	42
4.11.	Tingkat Pendidikan Penduduk	43
4.12.	Mata Pencaharian Pokok	45
4.13.	Akses Sarana Transportasi Darat	45
4.14.	Prasarana Air Bersih	46
4.15.	Prasaran Sanitasi	46
4.16.	Prasarana Kesehatan	46
4.17.	Sarana Kesehatan	47
4.18.	Tingkat Pendidikan Penduduk	47
4.19.	Data Penduduk Berdasarkan KK, Jiwa, Usia dan Pekerjaan	49
4.20.	Data Dasar Lansia Puskesmas Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari - Tahun 2010	53
4.21.	Nama Kelompok Lansia Binaan Dinas Sosial Kota Surabaya s/d Tahun 2008	53
5.1.	Identitas Responden Di Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari	56
5.2.	Kondisi Ekonomi Responden Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari	59

5.3.	Jenis Pekerjaan Responden Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari	64
5.4.	Isu-isu Strategis Yang Disampaikan Kepada Responden di Kecamatan Kenjeran Dan Tegalsari	66
5.5.	Jawaban Responden Terhadap Peran Pemerintah Dalam Program Bantuan	71
5.6.	Jawaban Responden Terhadap Jenis Pelatihan dan Keterampilan Yang Diharapkan	76

Daftar Gambar

Gambar	
2.1. Kerangka Berfikir Kegiatan Lansia dan Keluarganya	20
4.1. Peta Wilayah Kota Surabaya	30
5.1. Jenis Kelamin Responden	57
5.2. Usia Responden (Tahun)	57
5.3. Pendidikan Responden	58
5.4. Apakah Responden Mempunyai Pekerjaan Sampingan?	60
5.5. Apakah Penghasilan Tersebut Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidup?	61
5.6. Upaya Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari?	62
5.7. Tindakan Responden Pada Saat Pendapatan Tidak Cukup Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari?	62
5.8. Kemajuan Usaha Responden	63
5.9. Kondisi Ekonomi Keluarga Saat Ini Dibandingkan Dengan Keadaan Sebelumnya	63
5.10. Apakah Ada Kesempatan/ Peluang Mencari Pekerjaan Diluar Pekerjaan Pokok Selama Ini?	63
5.11. Pekerjaan Responden	65
5.12. Apakah Menurut Responden, Masyarakat Perlu Dibantu Dalam Meningkatkan Ekonomi Keuarganya?	67
5.13. Jenis Bantuan Yang Dibutuhkan/ Diharapkan?	68
5.14. Jenis Keterampilan Yang Dimiliki Oleh Responden	69
5.15. Alat Produksi Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Responden Dan Dimiliki Oleh Keluarga?	69
5.16. Tantangan Terberat Apa Yang Kemungkinan Dihadapi Responden Dalam Mengembangkan Kegiatan Usaha?	70

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara tertinggi dalam pertumbuhan penduduk Lanjut Usia (414% dalam kurun waktu 1990-2010) serta negara keempat dalam hal berpenduduk struktur tua setelah China, India, Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS) mensurvei bahwa jumlah Lansia di Indonesia sebanyak 17.717,800 jiwa atau 7,90% (BPS-Susenas 2006), dan jumlahnya pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 23.992.552 (9,77%) dan pada tahun 2020 sebesar 28.822.879 (11,34%). Masih diperparah dengan keadaan Lansia Indonesia, sebanyak 2.426.191 (15%) terlantar, dan sebanyak 4.658.279 (28,8%) rawan terlantar. Di tingkat perdesaan dan perkotaan, jumlah Lansia yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 35,53%, yang tidak tamat SD sebesar 30,77% dan yang tamat SD sebesar 21,27% (BPS-Susenas 2006). Permasalahan akan timbul karena jumlah Lansia yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis sebesar 35,87% (BPS-Susenas 2006 dalam Martono).

Pembangunan telah meningkatkan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Pemerintahan Republikl Indonesia telah secara berkelanjutan menaruh kepedulian yang khusus kepada penduduk Lansia. Di tingkat nasional, berturut-turut telah ditetapkan sejumlah kebijakan. Antara lain, Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 1992 Kesehatan; UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia); UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional; UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI No. 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan Keputusan Presiden No. 52/2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

Pendahuluan

Hal ini semua, karena Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Provinsi Jawa Timur Tidak kalah ketinggalan untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut, sejak berlakunya PERDA Nomor 5 Tahun 2007 tentang “Kesejahteraan Lanjut Usia” yang diiringi dengan meningkatnya jumlah pelayanan dan fasilitas penduduk Lansia. Seperti yang tertuang dalam PERDA tersebut meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual; Pelayanan kesehatan; Pelayanan kesempatan kerja; Pelayanan pendidikan dan pelatihan; Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan Bantuan sosial. Hal tersebut sebagai prestasi sekaligus tantangan. Karena, meningkatnya jumlah pelayanan tidak sebanding dengan populasi Lanjut Usia yang meningkat tanpa bisa dihentikan. Dewasa ini Lanjut Usia yang tertangani melalui sistem panti hanya 15.000, sistem non panti 20.000. Secara keseluruhan yang tertangani hanya 2 % dari 3,6 juta Lanjut Usia. Gambaran di atas menegaskan bahwa pelayanan belum maksimal. Di samping kendala dana dan petugas, Lansia mengalami keterlantaran, ada yang menjadi pengemis, dan di antaranya terkena tindak kekerasan, oleh orang lain maupun oleh kerabat sendiri. Berbagai kebijakan dan pelayanan dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik melalui sistem panti maupun sistem non panti berbasis masyarakat mulai kebutuhan dasar sampai penguburan.

Jumlah Lansia di Jawa Timur saat ini berdasar pada data dari Dinas Sosial telah mencapai angka 10% dari total 36 juta penduduk yakni, 3,6 juta jiwa. Sedangkan pada Sensus Penduduk (SP) Tahun 2000 penduduk Jawa Timur mencapai angka 34,7 juta. Jumlah angkatan tersebut tentu akan bertambah jika juga memasukkan penduduk yang telah memasuki masa pensiun bagi PNS misalnya umur 55 tahun digolongkan dalam Lansia, 1998 Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun.

Kepedulian pemberian hak-hak sebagai bentuk apresiasi terhadap Lansia untuk menjaga harkat dan martabatnya merupakan prioritas yang harus ditindak-lanjuti secara terus menerus. Diprioritaskan pada aspek kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi Lansia; Pemberian hak-hak berupa perolehan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu kebutuhan membangun rasa percaya diri Lansia sebagai modal bersosialisasi di masyarakat yang lebih luas, untuk meningkatkan kemandirian sehingga hidup akan lebih berkualitas merupakan tanggung jawab kita semua. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya saat ini untuk penduduk Lansia di Kota Surabaya sejumlah 10.943 penduduk Lansia. Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan beberapa fasilitas untuk para Lansia selain KTP seumur hidup, Pemerintah Kota memfasilitasi Lansia miskin terlantar yang tidak ada perhatian dari keluarga yaitu, Liponsos; juga terdapat wadah kegiatan binaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia yang banyak berperan dalam pendampingan yaitu Dinas Kesehatan. Hal tersebut merupakan bagian wujud perhatian kepedulian pemerintah terhadap Lansia. Kegiatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya Lansia adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat di lapisan masyarakat agar Lansia bisa berdaya dan mandiri sehingga hari-harinya hidup berkualitas.

Pemberdayaan Lansia yang dimaksud adalah menciptakan aktivitas/kegiatan usaha sesuai kemampuan dan kemauan Lansia Meskipun pemberdayaan Lansia di sini bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi yang secara utuh namun, dari sudut pandang secara normatif pemberdayaan Lansia secara implisit mengandung arti menegaskan demokrasi ekonomi. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Oleh karena itu, pertama-tama yang

Pendahuluan

perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan Lansia tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan Lansia dalam berinteraksi dalam masyarakat lingkungan yang bersangkutan.

Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.

Kondisi Lanjut Usia yang rentan secara psikis, membutuhkan lingkungan yang mengerti dan memahami mereka. Lanjut Usia membutuhkan teman yang sabar, yang mengerti dan memahami kondisinya. Mereka membutuhkan teman ngobrol, membutuhkan dikunjungi kerabat, membutuhkan sapaan yang sejuk, dan sangat senang jika didengarkan nasehatnya. Lanjut Usia juga butuh rekreasi, silaturahmi kepada kerabat dan masyarakat (Suharto, 2008). Oleh karena itu, pemberdayaan Lansia menjadi tanggungjawab kita semua bukan saja tanggung jawab pemerintah. Jika Pemerintah Kota Surabaya mempunyai inisiatif kegiatan memberdayakan Lansia melalui pendekatan awal strategi maka, sudah sepatutnya kita ikut mendukung kegiatan perumusan strategi pemberdayaan Lansia tersebut karena pemerintah mempunyai keterbatasan keikutsertaan masyarakat, sebenarnya bukanlah semata-mata karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah, namun ada aspek lain yaitu karena jika pemberdayaan tersebut berbasis masyarakat maka masyarakat haruslah peduli kepada Lanjut Usia yang ada di lingkungannya (*home care*). Oleh karena itu, diharapkan masyarakat ikut mendukung strategi pemberdayaan Lansia dan keluarganya Kota Surabaya. Kenapa keluarga menjadi bagian kepedulian pemerintah, karena banyak kasus

keluarga yang tidak peduli kepada orang tua yang berada dilingkungannya. Maka keluarga perlu diberi pengetahuan bagaimana merawat, menyantuni lahir dan batin Lanjut Usia menata mempersiapkan mental sedini mungkin sehingga, upaya mempersiapkan hari esok yang baik bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh kita semua yang pasti akan menjadi Lanjut Usia juga.

1.2. Permasalahan Kegiatan

Ada beberapa permasalahan yang signifikan dalam penyusunan buku tentang Lansia Berkualitas ini, dan perlu disampaikan agar dalam pembahasan analisis nantinya dapat ditindaklanjuti, di antaranya:

1. Bagaimanakah merumuskan profil Lanjut Usia (Lansia) di Wilayah Kota Surabaya?;
2. Bagaimanakah kemampuan teknis Lanjut Usia (Lansia) yang dimiliki di Wilayah Kota Surabaya?;
3. Bagaimanakah merancang strategi program kegiatan yang sesuai dengan kemampuan Lansia agar hidupnya menjadi berkualitas di Wilayah Kota Surabaya ?;

1.3. Tujuan, Manfaat dan Sasaran Kegiatan

1.3.1. Tujuan Kegiatan

Merupakan kesadaran dan bekal pengetahuan bagaimana seharusnya menciptakan dan membina para Lanjut Usia menjadi yang berkualitas. Tujuan penyusunan buku Lansia berkualitas di Kota Surabaya adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Lansia untuk dijadikan prioritas bagi program pemberdayaan di wilayah Kota Surabaya;
2. Mengidentifikasi persyaratan teknis manajemen dan kelembagaan dari berbagai kegiatan ekonomi yang layak dijadikan prioritas;
3. Merancang sejumlah kegiatan fungsional strategik yang perlu dilakukan agar kegiatan ekonomi yang secara ekonomis memang layak dijadikan prioritas utama, benar-benar dapat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan kualitas Lansia yang diharapkan;

1.3.2. Manfaat Kegiatan

Berdasarkan uraian latarbelakang dan tujuan penyusuna buku Lansia Berkualitas di Kota Surabaya ini, manfaat yang bisa diharapkan adalah:

1. Dapat dipakai sebagai informasi ilmiah untuk bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat perumusan kebijakan publik strategi pemberdayaan Lansia di Wilayah Kota Surabaya;
2. Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan masing-masing bidang penyelenggaraan kegiatan yang terkait program pemberdayaan Lansia di Wilayah Kota Surabaya;
3. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang jaminan pelayanan kesejahteraan Lansia Berkualitas.

1.3.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah sebuah dokumen Penyusunan Strategi Pemberdayaan Lansia Berkualitas di Wilayah Kota Surabaya.

2.1 Dasar Hukum Pemberdayaan Lanjut Usia

Pemerintahan Republik Indonesia telah secara berkelanjutan menaruh kepedulian yang khusus kepada penduduk Lansia. Mulai di tingkat nasional, provinsi dan bahkan di tingkat wilayah kabupaten/kota telah ditetapkan sejumlah kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan kegiatan strategi pemberdayaan Lansia Kota Surabaya, hal tersebut berturut-turut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998, tentang Lembaga- Lembaga Kesejahteraan Lanjut usia;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
8. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga;
9. Keputusan Presiden No. 52/2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Tahun 2005 seri E).
11. Kepmensos No.10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lansia;
12. Kepmensos No. 79/HUK/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kessosialan Kepada PEMDA Tingkat II;
13. Permendagri No. 60/2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lansia di Daerah.

2.2 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). *Bryant & White* (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Sementara *Freire* (1994) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan masyarakat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai makna, yakni: mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. (*Pranarka dan Prijono*, 1996). Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya.



Dalam pandangan *Pearse* dan *Stiefel* dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (*Pranarka dan Priyono, 1996*).

Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praktis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). *Community development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri’, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and a sustaniable*” (*Chambers, 1995*). Pendekatan pemberdayaan, dalam konsep pemberdayaan ini masyarakat

Tinjauan Teori

dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS, meliputi:

1. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka;
2. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan;
3. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan;
4. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki;
5. *Responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.

Terakhir, keenam, support atau dukungan, adanya adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik'.

2.2.1 Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia)

Tahap Perkembangan *integrative* (60-an tahun) vs *despair*, pandangan *retrospektif* (melihat kembali ke belakang) ini akan memperlihatkan gambaran suatu kehidupan yang telah dilalui dengan baik, apabila orang itu merasakan suatu kepuasan, maka integritas dirinya tercapai. Melalui aneka ragam dan dinamika pengalaman yang memuaskan tersebut, maka ia akan melakukan hal yang positif dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, jika insan lanjut usia ini dalam menjalani tahap-tahap perkembangan sebelumnya dilalui

secara negatif, maka pandangan *retrospektif* cenderung akan menghasilkan rasa bersalah atau kemuraman – *despair* (putus asa), ini berarti di penghujung kehidupannya ia cenderung tidak akan mengabdikan dirinya secara baik kepada lingkungannya (Erik Erikson) dalam Pemberdayaan Lansia di bidang pendidikan Harina Yuhetty dan Tim.



Seperti yang telah diungkapkan pada uraian di depan pada bab pendahuluan, pemberdayaan adalah menjadi kewajiban kita seluruhnya. Kita dimaksudkan adalah seluruh komponen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan baik secara fisik maupun non fisik Lansia maka, pemberdayaan yang sudah banyak dilakukan tersebut adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat haruslah peduli kepada Lanjut Usia yang ada di lingkungannya (*home care*).

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat tidak akan terburu-buru menitipkan orang tuanya ke panti sosial (*tresna werda*; karang wreda dan sejenisnya). Penitipan orang tua ke panti sosial membawa dampak negatif karena akan memutuskan hubungan emosional dengan anak cucunya. Banyak kasus setelah orang tua bermukim di panti, anak dan cucunya sangat jarang mengunjunginya bahkan ada yang tidak pernah dikunjungi sama sekali. Agar masyarakat menjadi peduli kepada orang tua yang berada di lingkungannya, maka harus diberi pengetahuan bagaimana merawat, menyantuni lahir dan batin Lanjut Usia. Secara sepintas arah pemberdayaan tersebut sepertinya hanya memberdayakan para Lansia agar mempunyai kemampuan, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, bagaimana pemberdayaan tidak saja terhadap para lanjut usia, dan

keluarganya namun juga kepada seluruh komponen masyarakat bangsa ini agar diberdayakan sehingga upaya-upaya peningkatan kesejahteraan Lansia dapat terwujud (Martono H dalam Gemari Tahun IX/Juni 2008).

2.2.2. Kebutuhan Lanjut Usia.

Mengutip uraian pada bab pendahuluan bahwa yang definisi **Lanjut Usia** yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih (Perda No. 5 tahun 2007 Provinsi Jawa Timur Tentang Kesejahteraan Lansia). Ada juga yang menyebutkan **Lansia** adalah pada usia memasuki masa pensiun. Kriteria Lanjut Usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun. Lansia adalah bagian dari sebuah proses biologis manusia yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, proses yang kemudian lazim disebut menjadi tua/ lanjut usia ini diawali dengan rangkaian perubahan pada fisik seseorang yaitu dengan berkurangnya fungsi tubuh seseorang yang berakibat berkurangnya fisik seseorang, yang diikuti dengan berkurangnya peran sosial/ ekonomi dalam keluarga dan masyarakat, hal tersebut secara psikologis akan mempengaruhi pola perilaku seseorang (Dinsos Surabaya, 2010 dalam TOR seminar Lansia). Berapapun usia yang kita sepakati bahwa, Lanjut Usia membutuhkan beberapa kebutuhan dasar dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan dasar tersebut terkadang banyak tidak terpenuhinya sehingga kehidupan Lansia menjadi terlunta-lunta. Beberapa kebutuhan dasar Lansia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan *Setiti SG* (2007) tersebut adalah meliputi:

1. Kebutuhan Fisik.

Kebutuhan Lanjut Usia secara fisik meliputi:

- (1) sandang;
- (2) pangan;
- (3) papan;
- (4) kesehatan; dan
- (5) spiritual.

Kebutuhan *makan* umumnya tiga kali sehari ada juga dua kali. Makanan yang tidak keras, tidak asin dan tidak berlemak. Kebutuhan *sandang*, dibutuhkan pakaian yang nyaman dipakai. Pilihan warna sesuai dengan budaya setempat. Model yang sesuai dengan usia dan kebiasaan mereka. Frekwensi pembeliannya umumnya setahun sekali sudah mencukupi. Kebutuhan *papan*, secara umum membutuhkan rumah tinggal yang nyaman.

Tidak kena panas, hujan, dingin, angin, terlindungi dari mara bahaya dan dapat untuk melaksanakan kehidupan sehari hari, dekat kamar kecil dan peralatan Lansia secukupnya. *Pelayanan kesehatan* bagi Lanjut Usia sangat vital. Obat-obatan ringan sebaiknya selalu siap didekatnya dan bila sakit segera diobati. Dibutuhkan fasilitas pelayanan pengobatan rutin, murah, gratis dan mudah dijangkau. Kebutuhan lainnya bagi Lanjut Usia yang ditinggalkan mati pasangannya. *Agar tidak* merasa kesepian, memerlukan teman mencurahkan isi hati. Perlu teman ngobrol, menjalani pekerjaan, bepergian, teman ketika berobat. Kebutuhan Lanjut Usia bila meninggal kelak berharap *ditunggu kerabat dikampung halaman*.

2. Kebutuhan Psikis

Kondisi Lanjut Usia yang rentan secara psikis, membutuhkan lingkungan yang *mengerti dan memahami* mereka. Lanjut Usia membutuhkan teman yang sabar, yang mengerti dan memahami kondisinya. Mereka membutuhkan teman ngobrol, membutuhkan *dikunjungi kerabat*, sering disapa dan *didengar nasehatnya*. Lanjut Usia juga butuh rekreasi, silaturahmi kepada kerabat dan masyarakat.



Sumber: Gemari Tahun IX/Juni 2008 Gerakan Nasional Pemberdayaan Lansia

3. Kebutuhan sosial

Lanjut Usia membutuhkan orang-orang dalam *berelasi sosial*. Terutama kerabat, juga teman sebaya, sekelompok kegiatan dan masyarakat dilingkungannya. Melalui kegiatan keagamaan, olah raga, arisan, dan lain-lain.

4. Kebutuhan Ekonomi

Bagi yang tidak memiliki pendapatan tetap, membutuhkan bantuan *sumber keuangan*. Terutama yang berasal dari *kerabatnya*. Secara ekonomi Lanjut Usia yang tidak potensial membutuhkan uang untuk biaya hidup. Bagi Lanjut Usia yang masih produktif membutuhkan *ketrampilan*, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bantuan modal usaha sebagai penguatan usahanya.

5. Kebutuhan Spiritual

Umumnya mereka mengisi waktu untuk beribadah. Melalui *ibadah* lanjut Usia mendapat *ketenangan jiwa*, pencerahan dan kedamaian menghadapi hari tua. Mereka sangat mendambakan *generasi penerus* yang *sungguh sungguh* menjalani ibadah.

2.2.3. Kendala Pemberdayaan Lansia

Dalam kehidupan sehari-hari para Lansia, terdapat beberapa masalah, yakni aspek keluarga dan aspek Lansia. Dalam aspek keluarga, terkadang kurangnya pengetahuan dan pemahaman keluarga terhadap kondisi lanjut usia. Masalah lain, kesibukan dan aktivitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya waktu

dan perhatian bagi lanjut usia, serta kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan menanggung lanjut usia. Sedangkan dalam aspek kendala Lansia, ada empat masalah yang dapat mempengaruhinya. Yaitu:

1. Masalah fisik

Yang secara alamiah menurun, sejalan dengan meningkatnya usia, sehingga para Lansia menjadi rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif dan kronis seperti jantung, kencing manis, hipertensi dan lainnya.

2. Masalah psikis

Yang antara lain, terjadinya perubahan emosi pada Lansia. Seperti mudah tersinggung, merasa tidak aman, merasa tidak berguna dan berbagai perasaan yang kurang menyenangkan lainnya.

3. Masalah sosial

Yang dijabarkan antara lain, para Lansia merasa kesepian dan tersisih, karena anak-anaknya telah berkeluarga dan tidak berada dilingkungannya atau kurangnya berinteraksi dengan kelompok sebaya.

4. Masalah ekonomi.

Sebagian besar para Lansia membutuhkan dukungan penuh dari keluarganya karena tidak mempunyai penghasilan lagi atau pensiun. Hal-hal seperti ini, disadari atau tidak pasti terjadi.

Sebetulnya, bukan hanya masalah yang timbul dari para Lansia, tapi juga peluang. Di antaranya, timbul sistem kekerabatan yang kuat, masyarakat Indonesia yang religius, semakin meningkatnya institusi (kelompok) yang mengelola dan memperhatikan lanjut usia, semakin meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan, adanya komitmen dari berbagai pihak dan tingkatan, serta tersedianya dukungan tenaga fungsional dari berbagai sektor terkait.

Seiring dengan meningkatnya proporsi Lansia dalam keluarga, maka Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan

Tinjauan Teori

kesejahteraan Lansia agar lebih bertaqwa, sehat mandiri dan produktif, semakin dibutuhkan.

Hal ini dapat dipahami karena secara fisik maupun mental Lansia memerlukan bantuan keluarganya. Bukan saja karena ketahanan tubuhnya telah jauh menurun dan bisa juga mudah terserang penyakit, secara mental Lansia biasanya mudah mengalami stress karena mereka sering tidak siap menjadi tua dan faktor-faktor penyebab lainnya dari Lansia tersebut. Dalam kondisi apapun juga Lansia yang berada dalam lingkungan keluarga harus diupayakan kesejahteraannya sekaligus diberdayakan sesuai kemampuannya, sehingga mereka merasa tetap menjadi manusia yang berguna/ bermanfaat bagi orang lain (Hardywinoto dan Setiabudhi, 1999).

Alasan utama pengabdian Lansia adalah:

- Panggilan hati nurani;
- Agar tidak tertinggal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- Karena mendapatkan kesempatan;
- Ingin tetap menjadi tulang punggung pembangunan;
- Tidak ingin disantuni;
- Tidak ingin menjadi beban keluarga atau negara;
- Supaya tetap bugar dan sehat;
- Agar terhindar dari *post power syndrome*; Mencari kesibukan untuk menghindari rasa bosan atau kejenuhan.

2.2.4. Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut pendapat Salim, Emil (1976) miskin adalah:

- Masyarakat pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri;
- Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri;
- Tingkat pendidikan pada umumnya rendah;
- Banyak di antara mereka tidak memiliki fasilitas;
- Di antara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang memadai.

Ada beberapa kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di antaranya adalah:

1. Pengelolaan usaha yang masih tradisional;
2. Kualitas SDM yang belum memadai;
3. Skala dan teknik produksi yang masih rendah;
4. Terbatasnya akses ke lembaga keuangan;
5. Rendahnya akuntabilitas di tingkat masyarakat yang disebabkan persepsi yang keliru, bahwa dana milik masyarakat;
6. Sistem pembiayaan melalui kredit program yang cenderung hibah bergulir cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan proporsional;
7. Program pemberdayaan dapat dengan mudah dirubah menjadi komoditas politik sehingga menimbulkan distorsi.

2.2.5. Pendekatan Dalam Pemberdayaan

Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin adalah:

- Pendekatan yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat artinya peningkatan kapasitas senantiasa harus dikembangkan dan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- Pendekatan dengan cara menggunakan dan menggali apa yang dimiliki oleh masyarakat dan sikap yang perlu diciptakan pada setiap orang atau setiap anggota masyarakat agar percaya diri atau memiliki sikap mandiri
- Pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, dengan memilih jenis ketrampilan yang cocok dengan kondisi lingkungan dan ketrampilan dasar yang dikuasai.

2.2.6. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

- Prinsip keperpihakan bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi masyarakat.
- Prinsip pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat memiliki akses (peluang dan kesempatan) dan control (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan

dalam kegiatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.

- Semakin meningkatnya institusi (kelompok) yang mengelola dan memperhatikan lanjut usia, semakin meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan, semakin meningkatnya institusi (kelompok) yang mengelola dan memperhatikan lanjut usia, semakin meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan,
- Prinsip masyarakat sebagai pelaku, pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan sektor ekonomi

2.2.7. Langkah-Langkah Proses Pemberdayaan

- Setiap warga masyarakat dilatih agar mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik.
- Warga masyarakat dilatih atau diberikan berbagai macam ketrampilan sebagai jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapi.
- Warga masyarakat dibina untuk selalu bekerjasama dalam memecahkan masalah.

2.2.8. Strategi Pemberdayaan

Hamel dan Prahalad (1989) mendefinisikan strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perspektif pemberdayaan upaya Strategi Pemberdayaan hendaknya bertumpu peningkatan kemampuan masyarakat miskin itu sendiri untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, bukan justru membuat masyarakat miskin makin tergantung pada berbagai bantuan dari pemerintah. Upaya menumbuhkan kemampuan masyarakat miskin akan efektif apabila:

1. Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui strategi pemberdayaan total (*total empowerment*) yang di dalamnya mencakup adanya program perlindungan sosial, perbaikan lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi produktif;
2. Program perlindungan sosial, perbaikan lingkungan, pemberdayaan, program perlindungan Sosial, perbaikan

lingkungan, pemberdayaan sumberdaya manusia, program perlindungan Sosial, perbaikan lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, benar-benar difokuskan untuk mendukung program pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin;

3. Program pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, secara ekonomis layak dan prospektif serta secara teknis dapat dilakukan oleh masyarakat miskin.

Dengan strategi tersebut di atas diharap kann pemberdayaan akan efektif dan efisien. Di bawah ini penciptaan lingkungan yang mendukung sebuah strategi dengan mudah dilaksanakan menurut (Kartasasmita: 1997) antara lain meliputi pendekatan:

- *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang;
- *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empower-ing*);
- *Ketiga*, melindungi (*protecting*), sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi lingkungan baru dan perubahan pola masyarakat memerlukan inovasi. Dalam strategi ada 2 (dua) hal penting, yakni:

- a. Strategik terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi/kontrol terhadap strategi.
- b. Strategik memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan (integrasi) aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, program/keuangan/akuntansi dan produksi/operasional dari sebuah usaha. (Wahyudi, 1996).

Menurut pendapat *Hamel* dan *Prahalad* (1989) tersebut di atas, bahwa strategi adalah suatu yang harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan dan berinovasi karena strategi merupakan alat

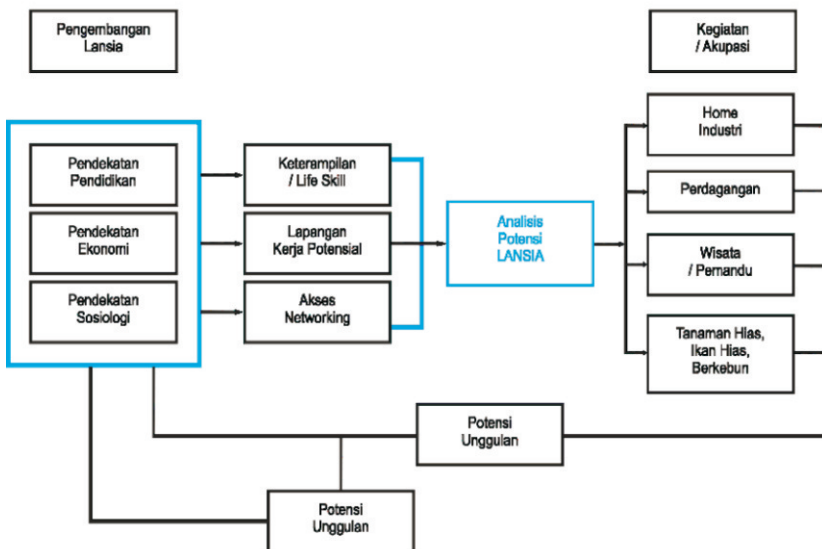
Tinjauan Teori

untuk mencapai tujuan, dan tujuan dalam strategi selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut di atas maka, dalam pelaksanaannya strategi pemberdayaan diperlukan:

- Pendampingan
- Fasilitas Program
- Optimasi peran masyarakat
- Kerjasama dengan lembaga profesional
- Kerjasama dengan dunia usaha

2.3. Kerangka Berfikir Kegiatan

Sejalan dengan latar belakang dan beberapa tinjauan teori maka kerangka kerja berfikir dalam penyusunan Lansia Berkualitas adalah seperti nampak pada gambar di bawah ini:



Gambar: 2.1
Kerangka Berfikir Kegiatan
LANSIA BERKUALITAS DAN KELUARGANYA

2.4. Rekomendasi Penelitian Sebelumnya

Rekomendasi dari beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait pemberdayaan Lansia di mana hari-harinya produktif sehingga Lansia hidupnya menjadi berkualitas seperti tersebut di bawah ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Setiti SG (2007) tentang Pelayanan Lanjut Usia Berbasis Kekerabatan. Dari hasil penelitian merekomendasikan antara lain:
 - Penguatan Ekonomi bagi kerabat yang lemah, agar ada peningkatan ekonomi dan dapat mencukupi kebutuhan lanjut usia secara lebih baik Terutama untuk pemenuhan gizi dan berobat ke Rumah Sakit yang biayanya mahal.
 - Penguatan ekonomi bagi Lanjut Usia potensial, yang memiliki UEP, dengan memberi dukungan dana, ketrampilan, bimbingan dari pemerintah, organisasi sosial maupun kelompok peduli.
 - Pengembangan Lembaga Organisasi Lanjut Usia, agar Lanjut Usia dapat menyumbangkan ilmu dan ketrampilannya, sekaligus sebagai kegiatan ekonomi maupun sosial kepada masyarakat.
 - Pembinaan Generasi Muda dilakukan dengan memperkuat Sistem Nilai Budaya masing masing. Memberikan berbagai motivasi melalui penyuluhan dan mempraktekannya dalam bersikap dan berperilaku sehari hari.
 - Meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia. Dengan cara Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia, yang didukung dengan tenaga dan pelayanan medis secara memadai, rutin, mudah, murah/gratis dan dekat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Harina Yuhetty, Tjipto Sumadi dan Tim tentang Pemberdayaan Lansia pada bidang pendidikan. Rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti:
 - Mengingat Usia Lansia Dini (awal 60-an tahun) masih produktif maka perlu dipertimbangkan kebijakan yang mengatur masa pensiun, terutama PNS.
 - Perlu ada pembekalan masa persiapan pensiun, agar pada saat seseorang memasuki usia pensiun dapat lebih produktif
 - Pemberian kesempatan kepada Lansia agar tetap dapat bekerja, dan mengaktualisasikan diri,

Tinjauan Teori

- Perlu dibentuk suatu wadah (lembaga) yang dapat digunakan sebagai tempat untuk berkomunikasi, baik antar-sesama Lansia maupun dengan pemangku kepentingan.
- Dapat dipertimbangkan adanya suatu lembaga setingkat direktorat yang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur, menangani, dan memberdayakan para Lansia dalam bidang pendidikan, termasuk tataran regulasi maupun administrasi (*databased*).

Metode Kegiatan

3.1. Jenis Kegiatan

Kegiatan studi untuk Lanjut Usia (Lansia) terfokus pada aktifitas produktifitas yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan Lansia Berkualitas ini adalah merupakan jenis penelitian bersifat diskriptif kualitatif. Di mana, penelitian diskriptif menurut Indriantoro (1999) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current opinion* dari subjek yang diteliti. Jenis penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok, atau *organizational*), kejadian atau prosedur. Sementara itu, Suryabrata (1997) menilai tujuan penelitian diskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, dan penulisan secara sederhana menggunakan prinsip *Rapid Assesment Procedurs (RAP)*. Meskipun RAP telah mengakomodir pendekatan kualitatif, FGD tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

3.2. Pendekatan Kegiatan

Dilandasi oleh konsep dasar pada bab I, dan bab II pada pembahasan sebelumnya, maka untuk menyelesaikan kegiatan kajian Lanjut Usia Berkualitas, diperlukan tahapan/langkah-langkah penyelesaian yang dirangkum pada pendekatan penyelesaian materi sebagai berikut:

1. Pendekatan yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat artinya peningkatan kapasitas senantiasa harus dikembangkan dan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan dengan cara menggunakan dan menggali apa yang dimiliki oleh masyarakat dan sikap yang perlu diciptakan pada

setiap orang atau setiap anggota masyarakat agar percaya diri atau memiliki sikap mandiri;

3. Pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, dengan memilih jenis ketrampilan yang cocok dengan kondisi lingkungan dan ketrampilan dasar yang dikuasai.

3.3. Operasional Variabel

Pengertian “pemberdayaan” dalam ruang lingkup kegiatan kajian Lanjut Usia Berkualitas ini dimaknai sebagai segala usaha untuk kemandirian, sehingga hidupnya tidak menjadi beban orang lain bebas dari belenggu kemiskinan di mana kesempatan-kesempatan ekonomis terbuka bagi Lansia, karena jika mengalami kesulitan akan menjadi tercipta kemiskinan seperti yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia yang dimaksud dalam kegiatan di sini adalah seseorang yang telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun lebih (> 50 tahun);

Beberapa tolak ukur dalam menyusun kajian tentang Lansia Berkualitas meliputi:

1. Faktor pendidikan
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor sosiologi

3.4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan kajian jenis data:

- a. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang dikumpulkan langsung dari responden kajian, untuk melengkapi data dibutuhkan observasi, FGD dan wawancara.
- b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai kebijakan dan peraturan, literatur dan dokumen terkait.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data ini dapat diperoleh dari:

- Bappemas

- Bappeko
- Dinas Sosial
- Dispendik
- Unsur Kecamatan
- Masyarakat Lansia/responden
- Keluarga/kerabatnya
- LSM/NGO
- Tokoh Masyarakat setempat

3.4.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Library Research* melalui literatur, kebijakan, peraturan dan dokumen-dokumen yang relevan.
- b. *Field Research* yaitu pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada responden yang relevan dan responden kajian, untuk melengkapi data dibutuhkan observasi, FGD dan wawancara. Observasi serta wawancara mendalam kepada responden terpilih.

Selanjutnya untuk meyakinkan hasil kajian, Tim akan mengambil data primer melalui kecamatan dengan kriteria responden yang ditentukan oleh tim berkisar antara usia 50 tahun keatas dan berasal dari keluarga miskin. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan responden yang berkaitan dengan harapan – harapan yang diinginkan untuk mengisi kegiatan hari tuanya. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi, FGD pada kelompok: (Kerabat, Tokoh Agama/ masyarakat) setempat. Observasi pada lingkungan tempat tinggal Lanjut Usia dirawat. Wawancara berstruktur kepada Lanjut Usia, kerabat yang melayani Lanjut usia.

Wawancara mendalam untuk informan kunci. Diskusi terbatas kepada pejabat terkait pada tingkat provinsi. Tokoh agama/ adat/ masyarakat, Pengurus kerabat, Dinas sosial, LSM, kader/ peduli yang merawat Lanjut Usia.

3.5. Lokasi Kegiatan

Lokasi studi berada di kecamatan yang jumlah rumah tangga Lansianya besar di Wilayah Kota Surabaya, yaitu: Kecamatan Semampir, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Sawahan. Dari kriteria wilayah tersebut, secara metodologi hasil *survey* lokasi ditentukan sebagai wilayah dengan tipologi metropolis kegiatan adalah Kecamatan Tegalsari dengan mengambil Kelurahan Wonorejo; dan sebagai wilayah dengan tipologi pesisir adalah Kecamatan Kenjeran dengan mengambil Kelurahan Tanah Kalikeding.

3.6. Populasi Dan Penentuan Sampel

Populasi dalam kajian ini meliputi penduduk Lanjut Usia di Wilayah Kota Surabaya. Kajian ini menggunakan sampel untuk menjeneralisasi gejala yang ada dalam populasi. Jumlah sampel ditentukan dengan kriteria sesuai dengan tujuan dan output dari kegiatan kajian Lansia Berkualitas yaitu Lanjut Usia terutama yang tinggal beserta keluarganya. Ciri ciri Lanjut Usia lainnya yang disepakati bersama sesuai hasil *survey* pendahuluan di wilayah kegiatan adalah: Lanjut Usia bila telah berusia > 50 tahun, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya (miskin), dan tinggal bersama keluarga/punya keluarga.

Jumlah responden sebagai sampel diambil paling sedikit 100 orang, pengambilan sampelnya dilakukan dengan tehnik *random sampling* (acak), dari dua (2) lokasi kelurahan yang sudah ditentukan tersebut di atas.

3.7. Teknis Dan Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi makna dari data sekunder dan data primer, serta disajikan dengan tabel frekuensi dan uraian kata-kata serta kutipan langsung dari wawancara. Beberapa tahapan dalam analisis diskriptif antara lain:

3.7.1. Kompilasi Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari survey di lapangan, kemudian dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa agar mudah dibaca, mudah dilihat hubungannya satu dengan yang lain, serta informatif. Usaha penyusunan demikian disebut kompilasi data. Tahap kompilasi data ini harus mempunyai bobot 'pra analisa'. Artinya, dari kompilasi data ini data sudah dapat terbaca segala kecenderungan di masa mendatang, yang akan sangat penting peranannya dalam proses pembuatan prediksi.

Macam kompilasi data dipengaruhi oleh sistem analisa yang akan digunakan, yang juga menentukan volume data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pencatatan data (data mentah) harus dibuat sedemikian rupa agar dapat berguna bagi analisa apapun. Dengan kata lain, data mentah harus dibuat selengkap mungkin dan terperinci. Kompilasi data ini dapat disajikan dengan berbagai cara, antara lain dalam bentuk tabel, peta, grafik, gambar, dan bagan.

1. Analisis masalah isue pemberdayaan yang dimaksudkan untuk mengetahui penyusunan kegiatan Kajian Lansia Berkualitas.
2. Analisis kebijakan dimaksudkan untuk mereview kebijakan yang telah dan akan dilakukan.

3.7.2. Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif digunakan dalam proses analisis data.

Data kuantitatif yang didapat dianalisis dengan statistic deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994:12). Analisis interaktif terdiri dari empat komponen yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) sajian data; dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi dan (5) kebijakan. Komponen-komponen analisis tersebut berinteraksi dan merupakan siklus. Triangulasi subjek, sumber, dan data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan akurat, dalam proses triangulasi, data akan selalu di-*crosschecked* pada subjek yg berbeda, sumber yg berbeda, dan/ atau data yang berbeda.

1. Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan (*fieldnote*) yang terdiri dari dua bagian. Pertama, catatan deskriptif yang merupakan catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti secara alami atau apa adanya dari lapangan tanpa ada pendapat dan tafsiran peneliti; Kedua, catatan reflektif yang merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang baru saja dijumpai, serta rencana untuk kegiatan pengumpulan data pada tahap berikutnya;

2. Reduksi Data.

Data yang dicatat dalam catatan lapangan yang jumlahnya banyak akan mempersulit penarikan kesimpulan. Maka data tersebut perlu dipersingkat, dirangkum, dan dipilih yang penting yang berkaitan dengan permasalahan. Reduksi data perlu dilakukan dengan hati-hati dan diulang secara terus-menerus hal ini disebabkan untuk menghindari kekeliruan dalam mereduksi. Karena dapat saja data yang ternyata perlu tetapi direduksi atau sebaliknya;

3. Sajian data.

Data yang sudah direduksi perlu disajikan dalam bentuk tulisan, matrik, grafik, gambar, atau tabel. Hal ini dimaksudkan agar mudah dilihat dan dipahami hubungan antara data satu dengan lainnya, sehingga akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan;

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama kajian berlangsung. Data yang diperoleh sejak awal kajian sudah mulai ditafsirkan dan diambil kesimpulannya, pada saat data masih sedikit jumlahnya, kesimpulan yang ditarik masih belum jelas, semakin banyak data yang didapat, maka kesimpulan akan semakin jelas; dan

5. Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Lansia Berkualitas.

Untuk menganalisis potensi ekonomi dengan pengembangan ekonomi produktif tersebut kedepan.

Distripsi Kondisi Eksisting

4.1. Administratif Kota Surabaya

4.1.1. Kondisi Geografis

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, terletak pada garis Lintang Selatan antara 7° 12' - 7° 21', dan 112° 36' -112° 54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 33.637,75 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. secara administrasi wilayah Kota Surabaya dibatasi oleh:

Sebelah Utara	: Selat Madura, Kabupaten Bangkalan
Sebelah Timur	: Selat Madura
Sebelah Selatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat	: Kabupaten Gresik

Keadaan topografi Kota Surabaya berada pada ketinggian antara 25 -50 m di atas permukaan air laut, di mana pada daerah pantai ketinggian berkisar antara 1-3 meter diatas permukaan air laut bahkan sebagian lebih rendah dari muka air laut Hampir seluruh daerah Kota Surabaya diklasifikasikan memiliki tanah dari jenis alluvial berbutir halus dengan ke dalaman lebih dari 0,9 m. Tanah- tanah ini relatif kedap, yang menghasilkan daya resap air rendah. Di area dataran rendah, tingkat permukaan air tanah berada pada sekitar 2-3 m di bawah permukaan tanah. Kondisi air tanah di sini umumnya dipengaruhi oleh material sedimen sungai dan untuk daerah yang lebih luas lagi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan laut.

Pada daerah yang bergelombang, air tanah dapat ditemui pada ke dalaman lebih dari 10 m. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kota Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° C. (Stasiun Pengamat Perak 1/Tahun 2004).

Secara administrasi pemerintahan kota Surabaya dikepalai oleh wali kota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 163 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.363 RW (Rukun Warga) dan 8.909 RT (Rukun Tetangga). Secara umum peta wilayah Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Gambar: 4.1
Peta Wilayah Kota Surabaya
Sumber: Jatim Map

4.1.2. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2009 adalah sejumlah 2.938.225 jiwa. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sejumlah 226.814 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Bulak sejumlah 36.615 jiwa. Komposisi penduduk Kota Surabaya pada Tahun 2009 berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 1.474.874 jiwa penduduk laki-laki (50,20%) dan 1.463.351 (49,80%) jiwa penduduk perempuan, dalam ILPPD Kota Surabaya Tahun 2009.

4.1.3. Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi Surabaya masih ditopang oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 61.85% pada tahun 2009. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sector utama yang menopang perekonomian dengan kontribusi sebesar 38.26% dan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

Hal ini mencerminkan bahwa Surabaya merupakan kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Kota Surabaya dengan penduduk kurang lebih sebanyak 2,9 juta jiwa merupakan pasar dan potensi ekonomi yang potensial. Selain didukung oleh sektor tersier yang sangat besar peranannya, Surabaya juga didukung oleh sektor sekunder dengan kontribusi total mencapai 38.06% pada tahun 2009. Sektor tersebut terdiri atas sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 28.10%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3.26% dan sektor kontruksi sebesar 6.70%. Perkembangan yang terjadi dalam sektor-sektor penggerak perekonomian kota tidak terlepas dari adanya dukungan masyarakat yang kondusif serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya.

Potensi unggulan yang dimiliki Kota Surabaya merupakan produk yang berasal dari UMKM. Usaha ini bukan hanya berfungsi dalam penyerapan tenaga kerja, namun terbukti sebagai suatu bentuk

Deskripsi Kondisi Eksisting

kegiatan usaha yang memiliki fleksibilitas dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sebagai katup pengaman kebutuhan rumah tangga. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan usaha untuk mengembangkan UMKM seperti pelatihan dan pendampingan. Beberapa produk unggulan yang ada antara lain makanan dan minuman, pakaian jadi, kerajinan tangan, furniture dan olahan hasil laut.

Kondisi ekonomi daerah secara umum ditunjukkan antara lain oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi. PDRB Kota Surabaya ditinjau dari segi produksi, yaitu berasal dari total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit Produksi di Kota Surabaya dalam periode tertentu. PDRB Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar Rp 154.242.135,97 juta (Atas Dasar Harga Berlaku) yang disumbang oleh sembilan sektor ekonomi yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Dari ke sembilan sektor tersebut sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar yaitu sebesar Rp 60.349.244,27 juta (Tahun 2009). Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah sektor PHR yaitu mencapai Rp 44.382.834,12 juta (ADHB) Pendapatan perkapita Kota Surabaya pada tahun 2009 lebih kurang besarnya Rp. 53.186.943.

Trend pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Trend penurunan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur maupun nasional. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2009 sebesar 5.51% masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar (4.77%) dan Nasional (4%).

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Kota Surabaya membaik di tengah isu gejolak ekonomi global, selain itu dampak positif sebagai kota perdagangan terbesar kedua tertolong, dengan adanya persaingan antar usaha, sehingga masyarakatnya dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang lebih murah dibandingkan

dengan daerah lainnya. Peranan sektoral pada tahun 2009 tertinggi ada pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Industri Pengolahan. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berkontribusi sebesar 38.26%, sedangkan peranan Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar 28.10%. Peranan sektor lainnya tidak berpengaruh sebesar kedua sektor tersebut, pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2009 sebesar 10.10% . Sektor yang peranannya sangat kecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan (0,01%), sedangkan setelah DKI Jakarta adalah daya beli masyarakat di sini cukup Sektor Pertanian (0,09%), Profil Kelurahan Tanah Kalikedidnding Kecamatan Kenjeran, Maret tahun 2010.

4.1.4. Pembangunan dan Prasarana Jalan

Pola jaringan jalan utama di Surabaya pada dasarnya adalah berbentuk linier yang menghubungkan kawasan Utara dan Selatan (Tanjung Perak-Waru). Pola jaringan jalan tersebut terbentuk sesuai dengan catatan sejarah perkembangan Kota Surabaya. Namun saat ini telah terjadi pergeseran dari arah yang linier, cenderung berbentuk radia persegi panjang seiring dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kawasan Barat - Timur Surabaya serta meningkatnya penggunaan jalan tol Surabaya - Malang.

Sebagai jaringan jalan peninggalan masa lalu, jaringan jalan di Kota Surabaya lebih menghubungkan koridor Utara - Selatan kota dan kurang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada koridor Barat - Timur Kota Surabaya. Akibat dari hal tersebut sudah mulai terasa saat ini dimana kurang memadainya jaringan jalan yang menyediakan akses Barat-Timur Kota Surabaya mengakibatkan lintasan rute perjalanan yang jauh untuk perjalanan dari Barat-Timur dan sebaliknya. Namun upaya untuk lebih mengembangkan akses Barat-Timur saat ini sudah mulai dikembangkan seiring dengan perkembangan kawasan Barat dan Timur Kota Surabaya.

Salah satu masalah utama dalam hal jaringan jalan di Kota Surabaya saat ini adalah banyak fungsi jalan yang mengalami penurunan fungsi dari yang telah direncanakan. Bercampur baurnya segala macam jenis kendaraan atau *mix traffic* (mobil, truk, bis, sepeda motor, becak dan lain-lain) serta berbagai macam hambatan di samping

jalan seperti aktifitas di tepi jalan, pedagang kaki lima, dan pedestrian semakin menambah beban dari sebagian besar jalan-jalan di Kota Surabaya. Fenomena semacam ini telah mengakibatkan terhambatnya fungsi utama dari jalan yaitu guna meneruskan arus lalu lintas sesuai dengan kapasitas jalan yang telah direncanakan.

Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemantapan fisik pembangunan jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan. Panjang jalan di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 adalah 1400 km dengan lebar jalan berkisar antara 3 meter sampai dengan 30 meter, sedangkan kapasitas jalan yang ada, rata-rata mencapai 223,523 satuan mobil penumpang per jam (smp/jam) dengan volume kendaraan rata-rata mencapai 155,099 satuan mobil penumpang per jam (smp/jam).

Berdasarkan data kapasitas jalan dan volume kendaraan tersebut, maka nilai derajat kejenuhan atau V/C ratio mencapai angka 0.692. Angka tersebut diartikan bahwa rata-rata kondisi jalan di Kota Surabaya dalam kondisi stabil dengan kecepatan rata-rata berkisar 30km/jam sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas di Jalan. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.8, maka capaian kinerjanya mencapai 113.5%. Meskipun V/C ratio telah mencapai angka 0.692, namun masih terdapat beberapa jalan strategis di Kota Surabaya yang tingkat derajat kejenuhannya mencapai angka 0.9 sampai > 1,00 dengan kecepatan rata-rata < 15 km/jam. Jalan-jalan strategis tersebut antara lain Jalan A.Yani, Jalan Raya Wonokromo, Jalan Rungkut Menanggal, dan Jalan Urip Sumoharjo.

4.1.5. Sosial Budaya Daerah

Sebagai kota metropolitan, Surabaya secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi yang menjadi masalah pertumbuhan kota yang ekspansif ternyata tidak diimbangi dengan tingkat perkembangan bidang sosial budaya yang memadai seperti aspek kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan kesempatan

kerja bagi penduduk yang bertambah cepat. Untuk menakar sejauh mana kemajuan program pembangunan bidang sosial-budaya di Kota Surabaya setidaknya harus berkaca pada dua hal. Pertama sejauhmana kota itu telah mampu menyediakan layanan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduknya, khususnya bagi penduduk miskin kota, Kedua sejauh mana kebijakan dan kemajuan sebuah kota dapat bersejajaran dengan kepentingan upaya mengembangkan kualitas pembangunan manusia. Sebuah kota yang tumbuh besar secara fisik dan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

4.1.6. Pendidikan

Pencapaian sasaran untuk meningkatkan pemerataan pada semua jenjang pendidikan, diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun keatas tercatat sebanyak 2.300.379 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan usia tersebut yang bisa membaca dan menulis sebanyak 2.236.379 jiwa atau 97.22 %.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar dihitung berdasarkan jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

4. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Negeri Yang Membebaskan SPP dan Uang Pangkal

Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan dana untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOPDA) sebagai

pendamping dana BOS untuk 217.121 siswa sekolah negeri dengan rincian sebagai berikut Sekolah Dasar sebanyak 176.528 Siswa yang tersebar di 496 sekolah dasar negeri dan 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 40.953 siswa yang tersebar di 45 sekolah dan 4 Madrasah Tsanawiyah. Disamping memberikan BOPDA pada sekolah negeri, Pemerintah Kota juga mengalokasikan BOPDA kepada 916 sekolah swasta dengan rincian, SD/MI sebanyak 442 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 272 sekolah, 118 SMA/MA dan 84 SMK.

4.1.7. Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di implementasikan melalui Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan serta memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan dengan upaya promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

4.2. Gambaran Wilayah Kegiatan

4.2.1. Kecamatan Kenjeran

1. Kondisi Geografi

Kecamatan Kenjeran merupakan wilayah kecamatan Surabaya yang berada di Surabaya bagian Utara. Tipologi masyarakatnya adalah masyarakat yang berada di daerah pesisir, karena berdekatan dengan wilayah pantai kota Surabaya. Masyarakatnya banyak berasal dari pendatang yang bersentuhan dari berbagai macam kultur, terutama masyarakat Madura dan beberapa daerah lain di luar Surabaya, seperti Lamongan, Gresik, Madura, dan lain lain Kecamatan Kenjeran terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Sidotopo Wetan, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kelurahan Bulak Banteng, serta Kelurahan Tambak Wedi. Berdasar data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tahun 2009, jumlah penduduknya berjumlah 116.747 jiwa, yang terdiri dari laki – laki 59.088 dan perempuan 57.659. dari jumlah tersebut keluarga

miskin yang menerima bantuan langsung tunai berjumlah 5770 jiwa. Potensi Kecamatan Kenjeran, sebagai wilayah yang memiliki sumber daya laut adalah penangkapan dan pengolahan ikan, pertambakan, aneka industri pengolahan hasil laut, pembuatan jaring dan industri perkapalan dalam skala kecil. Sementara industri berskala kecil atau industri rumah tangga seperti pengolahan krupuk, rambak dan trasi.

2. Program Pembangunan dan Anggaran

Beberapa program pembangunan dan anggaran yang disediakan untuk memajukan kecamatan dan kesejahteraan masyarakat di antaranya:

1. Pada tahun 2007 program PLP diharapkan mampu mencegah peningkatan potensi perkembangan lingkungan kumuh. Anggaran dialokasikan sebesar Rp 432.771.385,-
2. Program penunjang operasional RT dan RW, menelan anggaran jumlah relatif besar, tujuannya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan secara aktif untuk membangun wilayahnya masing-masing.
3. Program penerbitan KTP, KSK/KK dan surat keterangan lainnya, tahun anggaran 2007 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.780.320,-.
4. Pada tahun 2008 anggaran dialokasikan pada kegiatan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan. Tujuan program ini untuk peningkatan kualitas layanan birokratik mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Anggaran dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar 415.610.720,-.
5. Program pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2008 dialokasikan anggaran sebesar Rp 208.500.903,-.
6. Program pelayanan IMB dianggarkan lebih kecil, dikarenakan pertimbangan kuantitas layanan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan IMB adalah sebesar Rp 3.148.970,-.

3. Fasilitas Kesehatan

Jumlah Puskesmas Kecamatan Kenjeran berjumlah dua dengan jumlah tenaga medis sebagai berikut: Dokter umum terdapat 8 orang di Kecamatan Kenjeran dan 5 orang; dokter gigi berjumlah 4

orang; bidan ada 15 orang di Kecamatan Kenjeran serta perawat berjumlah 14 orang.

4.2.2. Gambaran Lokasi Kelurahan Tanah Kalikedinding

1. Kondisi Geografi

Batas Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran sebelah Utara perbatasandengan Kelurahan Tambak Wedi masih berada di Kecamatan Kenjeran, sebelah Selatan perbatasan dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, sebelah Timur perbatasan dengan Kelurahan Kedung Cowek dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, sedangkan sebelah Barat perbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran.

2. Luas wilayah

Luas wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding 2.430 ha berdasarkan data dari profil Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran tahun 2010 terdiri dari tanah sawah 400 ha, tanah kering 1590 ha dengan pengalokasian sesuai pemanfaatan masyarakat sebagai berikut pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel: 4.1
Menurut Penggunaan

No	Uraian	Luas
1	Luas Permukiman	1.440 ha
2	Luas Persawahan	400 ha
3	Luas Kuburan	40 ha
4	Luas Pekarangan	100 ha
5	Luas Taman	150 ha
6	Luas Perkantoran	100 ha
7	Luas Prasarana Umum lainnya	200 ha
	Luas Wilayah	2.430

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

3. Penduduk

Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kelurahan Bulak Banteng, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kelurahan Tanah Kalikedinding, dan Kelurahan Tambak Wedi secara rinci berdasarkan KK - L, KK - P, kelompok usia, dan jenis pekerjaan terlihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel: 4.2
DATA PENDUDUK BERDASARKAN KK, JIWA, USIA DAN PEKERJAAN

NO	NAMA KEC	KELURAHAN	KK	KK_L	KK_P	JIW A	JW L	JW_P	JW D1	JW D5	JW D17	JW D55	JW SD5 9	JW 60 th KE ATAS	JUM LAH	BER JUALAN	BUR UH HARI AN	IBU RUMAH TANGGA	PEGA WAI SWASTa	PET ANI	TIDAK BEKERJA	JUM LAH	
1	Kenjeran	Bulak	1.11	921	19	542	2.60	2.81	1	13	637	410	3.66	162	416	5.42	77	279	120	505	18	114	1.11
		Banteng	3		2	0	5	5	1				3										3
2	Kenjeran	Sidotopo	1.70	1.26	43	8.42	3.87	4.54	3	19	846	515	5881	272	711	8423	201	428	217	561	13	280	1700
		Wetan	0	6	4	3	8	5	5														
3	Kenjeran	T. Kalikedin	1.82	1.33	49	8.87	4.27	4.59	1	24	932	584	5.94	297	866	8.87	314	473	175	496	18	351	1.82
		dinq	7	7	0	0	4	6	5				5			0						7	
4	Kenjeran	Tmbk wedi	689	560	12	304	148	156	8	12	454	249	1926	81	205	3047	158	251	47	124	24	85	689
					1.2	25.7	12.2	13.5	4	69	2.8	1.75	17.4										
		Jmlh	5.32	4.08	4	45	60	40	20	13	5	69	8	15	812	2.198	750	1	559	1.686	73	830	5.32
			9	4												60							9

Sumber: Bappemas dan KB Surabaya – 2010

4. Perekonomian

Masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding penduduknya sebagian besar memiliki mata pencaharian bekerja sebagai karyawan pada perusahaan swasta, kemudian sebagian bekerja pada pengembangan usaha mikro dan kecil. Dan penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dari pada penduduk perempuannya, seperti terlihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel: 4.3
Mata Pencaharian Pokok

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Karyawan perusahaan swasta	12.017 Orang	8.065 Orang
2	Pengusaha kecil menengah	905 Orang	35 Orang
3	Sopir	315 Orang	0 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	115 Orang	110 Orang
5	POLRI	105 Orang	8 orang

Sumber: Profil Kelurahan Tanah Kalikedinding Maret-2010

Beberapa fasilitas lembaga keuangan setingkat koperasi juga telah tersedia di wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding. Koperasi baik kelompok simpan pinjam maupun koperasi mandiri dalam binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya. Jumlah unit koperasi seperti nampak pada tabel 4.4 berikut:

Tabel: 4.4
Unit Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha di Wilayah Kelurahan

No	Uraian	Jumlah Unit
1	Koperasi Simpan Pinjam	2 Unit
2	Kelompok Simpan Pinjam	5 Unit
3	Jumlah Unit Koperasi	8 Unit

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

5. Prasarana dan Sarana Umum Wilayah

Beberapa prasarana dan sarana fasilitas umum yang tersedia di wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Surabaya di antaranya:

Tabel: 4.5
Akses Sarana Transportasi Darat

No.	Uraian	Jumlah
1	Bus umum	1 Unit
2	Truk umum	2 Unit
3	Angkutan perkotaan	8 Unit
4	Becak	24 Unit

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

Prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding selain tersedia fasilitas transportasi darat juga tersedia prasarana air bersih, dan prasarana sanitasi. Jumlah fasilitas sumur bor dan jenis sumur lainnya, serta jenis dan jumlah sanitasi seperti terinci pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel: 4.6
Prasarana Air Bersih

No	Uraian	Kondisi Baik
1	Jumlah sumur bor	25 Unit
2	Jumlah sumur gali	60 Unit
3	Jumlah pangkalan air minum Kemasan	3 Unit
4	Jumlah hidran umum	10 Unit

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

Tabel: 4.7
Prasarana Sanitasi

No	Uraian	Keterangan
1	Sumur resapan rumah tangga	362
2	Septicktank	976
3	Jumlah MCK umum	2
4	Pemilik jumlah jamban keluarga	4.234
5	Kondisi saluran drainase/ saluran pembuangan air limbah yang baik	2

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

Sedangkan prasarana umum lainnya tersebut di atas yang tidak kalah penting di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding terdapat fasilitas prasarana dan sarana kesehatan, berikut:

Tabel: 4.8
Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas umum	1 Unit
2	Puskesmas pembantu	1 Unit
3	Poliklinik/ Balai pengobatan	2 Unit
4	Apotik	3 Unit
5	Posyandu	39 Unit
6	Balai pengobatan masyarakat yayasan/ swasta	1 Unit
7	Jumlah Rumah/ kantor praktek dokter	5 Unit
8	Rumah bersalin	2 Unit
9	Balai kesehatan ibu dan anak	2 Unit

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

Tabel: 4.9
Sarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dokter umum	5 Orang
2	Bidan	5 Orang
3	Apoteker/ Asisten apoteker	1 Orang
4	Kader kesehatan	30 Orang

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

Tabel: 4.10
Perkembangan Sarana dan Sarana Kesehatan Masyarakat

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Posyandu (unit)	39 unit
2	Jumlah kader posyandu aktif (orang)	210 Orang
3	Jumlah Pembina posyandu (orang)	8 Orang
4	Jumlah Dasawisma (Dasawisma)	336 Dasawisma
5	Jumlah pengurus dasawisma aktif (orang)	672 Orang
6	Jumlah kader bina keluarga balita aktif (orang)	17 Orang
7	Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif (orang)	1 Orang
8	Buku administrasi posyandu (jenis)	8 Jenis
9	Jumlah kegiatan posyandu (jenis)	2 Jenis
No	Uraian	Jumlah
10	Jumlah kader kesehatan lainnya (orang)	15 Orang
11	Jumlah keg. Pemberantasan sarang nyamuk/PSN (kali)	25 kali
12	Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan (kali)	3 kali

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikedinding Maret-2010

6. Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding penduduknya sebagian besar sudah menuntaskan pendidikan umum kelas atas (SMU). Jumlah penduduk berdasarkan usia dan pendidikan yang sederajat nampak seperti pada tabel 4.11 berikut:

Tabel: 4.11
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun masuk TK & kelom bermain anak	236 Orang
2	Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	708 Orang
3	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/ sederajat	118 Orang
4	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	18 Orang
5	Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	714 Orang
6	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTP/ sederajat	238 Orang
7	Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	990 Orang
8	Jumlah penduduk tidak tamat SLTA/ sederajat	29 Orang
9	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTA/ sederajat	4.571 Orang
10	Jumlah penduduk sedang D-1	24 Orang
11	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya D-1	1.132 Orang
12	Jumlah penduduk sedang D-2	36 Orang
13	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya D-2	1.121 Orang
14	Jumlah penduduk sedang D-3	27 Orang
15	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya D-3	412 Orang
16	Jumlah penduduk sedang S-1	36 Orang
17	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya S-1	1.786 Orang
18	Jumlah penduduk sedang S-2	22 Orang
19	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya S-2	225 Orang
20	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya S-3	5 Orang
21	Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	32 Orang

Sumber: Profil Kelurahan T Kalikeding Maret-2010

4.2.3. Kecamatan Tegalsari

1. Kondisi Geografi

Kecamatan Tegalsari merupakan kecamatan yang berada diwilayah pusat kota. Berdasar data lapangan yang didapat, bahwa masyarakat di kecamatan ini merupakan masyarakat yang berasal dari penduduk asli Surabaya serta para pendatang yang berasal dari berbagai macam wilayah di luar Surabaya seperti Malang, Jombang, Madura, Gresik, Lamongan dan lain – lain. Dari variasi asal penduduk, KecamatanTegalsari mempunyai lebih banyak varian kultur dan karakteristik masyarakat.

1. Kecamatan Tegalsari terdiri dari 5 kelurahan, yaitu: Kelurahan Keputran, Kelurahan Dr. Soetomo, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo, dan Kelurahan Kedung Baruk.
2. Berdasar data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tahun 2009, jumlah penduduk Kecamatan Tegalsari berjumlah 119.471 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 59.422 dan perempuan 60.049 dari jumlah tersebut keluarga miskin yang menerima bantuan langsung tunai berjumlah 4.791 jiwa .

3. Potensi ekonomi yang dimiliki adalah dalam bentuk perdagangan dan bisnis ritel yang tampak paling menonjol diantara keberadaan potensi ekonomi lainnya.
4. Partisipasi masyarakat dalam hal bantuan tenaga untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program-program kecamatan.
5. Jumlah anak putus sekolah sejumlah 43 orang.
6. Angka kemiskinan yang nampak sebesar 6.638 orang.
7. Jumlah sekolah baik TK, SD, SMP, SMA dan PT sejumlah 23 buah.
8. Sarana kesehatan terdiri dari: rumah sakit sejumlah 2 buah, puskesmas 2 buah dan Posyandu sejumlah 150 buah.

2. Program Pembangunan

1. Program penataan PKL dilakukan melalui kegiatan pembinaan PKL dan asongan yang berada dalam naungan bidang ketertiban kecamatan.
2. Program penyediaan sarana dan prasarana, serta administrasi menjadi sasaran tiap RT/tiap kelurahan.
3. Alokasi anggaran dana terkecil dikecamatan Tegalsari adalah program penerbitan KTP, KSK dan surat keterangan lainnya yakni sebesar Rp 7.780.320.-.

3. Fasilitas Kesehatan

Jumlah Puskesmas di Kecamatan Tegalsari ada dua dengan jumlah tenaga medis sebagai berikut: Dokter umum terdapat 5 orang; Dokter gigi berjumlah 3 orang Bidan ada 8 orang, serta perawat berjumlah 11 orang di Kecamatan Tegalsari.

4.2.4. Gambaran Lokasi Kelurahan Wonorejo

1. Kondisi Geografi

Batas Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebelah Utara perbatasan dengan Kelurahan Kedungdoro berada di Kecamatan Tegalsari, sebelah Selatan perbatasan dengan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, sebelah Timur perbatasan dengan Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari, sedangkan sebelah Barat perbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan.

2. Luas wilayah

Luas wilayah pemukiman Kelurahan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari 74 ha berdasarkan data dari profil Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari tahun 2010.

3. Perekonomian

Tabel: 4.12
Mata Pencanharian Pokok

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Karyawan perusahaan swasta	4.305 Orang	2.601 Orang
2	Pengusaha kecil menengah	312 Orang	257 Orang
3	Sopir	11 Orang	0 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	40 Orang	32 Orang
5	POLRI	12 Orang	0 orang

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

Masyarakat Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari penduduk laki-laki sebagian besar memiliki mata pencaharian bekerja sebagai karyawan pada perusahaan swasta yaitu sejumlah 4.305 orang, dan perempuan sejumlah 2.601 orang. Selanjutnya pada urutan ke dua penduduknya bekerja pada usaha kecil dan menengah, yaitu untuk laki-laki sejumlah 312 orang dan penduduk perempuan sebanyak 257 orang. Sedangkan penduduk lainnya bekerja sebagai sopir 11 orang, Pegawai Negeri Sipil 72, dan POLRI 12 orang. Seperti terlihat pada tabel 4.12 tersebut di atas.

4. Prasarana dan Sarana Umum

Beberapa prasarana dan sarana fasilitas umum untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan masyarakat yang tersedia di Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Surabaya di antaranya:

Tabel: 4.13
Akses Sarana Transportasi Darat

No	Uraian
1	Bus umum
2	Angkutan perkotaan
3	Becak

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

Untuk sarana transportasi yang tersedia Bus Umum, angkutan perkotaan, dan becak. Sedangkan prasarana dan sarana umum lainnya di Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari selain tersedia fasilitas transportasi darat juga tersedia prasarana air bersih, dan prasarana sanitasi. Jumlah fasilitas sumur bor tersedia 17 unit dan jenis sumur gali sebanyak 154 unit, juga terdapat fasilitas pangkalan air minum kemasan 8 unit. Sedangkan jenis dan jumlah sanitasi seperti terinci pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 di bawah ini:

Tabel: 4.14
Prasarana Air Bersih

No	Uraian	Kondisi Baik
1	Jumlah sumur bor	17 Unit
2	Jumlah sumur gali	154 Unit
3	Jumlah pangkalan air minum Kemasan	8 Unit

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

Tabel: 4.15
Prasarana Sanitasi

No	Uraian	Keterangan
1	Sumur resapan rumah tangga	19 Rumah
2	Septicktank	4567 Rumah
3	Jumlah MCK umum	22 Unit

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

Sedangkan prasarana umum lainnya yang tidak kalah penting di wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari terdapat fasilitas prasarana dan sarana kesehatan yang diperuntukkan untuk semua kalangan hingga posyandu Lansia, berikut pada tabel 4.16 dan tabel 4.17:

Tabel: 4.16
Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Poliklinik/ Balai pengobatan	2 Unit
2	Apotik	5 Unit
3	Posyandu	42 Unit
4	Balai pengobatan masyarakat yayasan/ swasta	2 Unit
5	Rumah bersalin	2 Unit
6	Balai kesehatan ibu dan anak	1 Unit

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

Sarana kesehatan di Kelurahan Wonorejo juga tersedia dokter jaga yaitu untuk dokter penyakit umum, dokter gigi, dan dokter spesialis lainnya. Yang tidak kalah penting dengan tersedianya dukun bersalin yang sudah terlatih masyarakat tidak perlu khawatir jika waktu persalinan tidak ada bidan yang siaga. Gambaran sarana prasarana kesehatan dimaksud seperti nampak pada tabel di bawah ini:

Tabel: 4.17
Sarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dokter umum	8 Orang
2	Jumah dokter gigi	4 Orang
3	Jumlah dokter spesialis lainnya	6 Orang
4	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 Orang
5	Bidan	2 Orang
6	Perawat	7 Orang
7	Dukun pengobatan alternative	3 Orang
8	Jumlah dokter praktek	8 Orang
9	Jumlah dokter umum	8 Orang

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

5. Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Wonorejo penduduknya sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan dasar/ sederajat yaitu sebanyak 5.703 orang. Selanjutnya terbanyak ke dua penduduknya telah tamat pendidikan SLTP/ sederajat. Jumlah penduduk berdasarkan usia dan pendidikan yang sederajat nampak seperti pada tabel 4.18 berikut: Prasarana dan Sarana Umum

Tabel: 4.18
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	378 Orang
2	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/ sederajat	5703 Orang
3	Jumlah penduduk yg pend. terakhirnya SLTP/ sederajat	3066 Orang
4	SLTA/ sederajat	4915 Orang
5	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya D-1	186 Orang
6	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya D-2	115 Orang
7	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya D-3	346 Orang
8	Jumlah penduduk tamat yang pendidikan terakhirnya D-4	109 Orang
9	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya S-1	365 Orang
10	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya S-2	13 Orang
11	Jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya S-3	2 Orang

Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Wonorejo-2010

7. Penduduk

Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Tegalsari meliputi Kelurahan Dr. Seotomo, Kelurahan Kedungdoro, Kelurahan Keputran, Kelurahan Tegalsari, dan Kelurahan Wonorejo secara rinci berdasarkan kelompok jenis pekerjaan, Usia, Jiwa laki-laki, dan kelompok Usia Perempuan terlihat pada tabel 4.19 di bawah ini:

Tabel 4.19
DATA PENDUDUK BERDASARKAN KK, JIWA, USIA DAN PEKERJAAN

NO	NAMA KEC	KELU RAHAN	KK	KK _L	KK _P	JIW A	JW _L	JW _P	JW	JW D1	JW D5	JW D17	JW SD59	JW 56	JW 60 TH KE ATA S	JUM LAH	BER JUA LAN	BUR UH HAR IAN	IBU RUM AH TAN GGA	PEGA WAI SWAS TA	PE TA NI	TDK BEKER JA	JUM LAH
1	Tegal Sari	Dr. Sutomo	690	459	23	3.12 9	1.5 56	1.5 73	-	67	343	184	1.92 3	120	492	3.12 9	163	153	64	143	4	163	690
2	Tegal Sari	Kedung Doro	648	387	26	299 2	148 6	150 6	-	68	281	182	1829	123	509	299 2	102	35	143	257	1	110	648
3	Tegal Sari	Kepu- tran	767	466	30	339 1	158 9	180 2	-	58	275	151	2439	97	371	339 1	152	121	92	170	4	228	767
4	Tegal Sari	Tegal Sari	136 2	930	43	602 5	295 6	306 9	2	134	562	330	3872	196	929	602 5	251	277	177	376	9	272	1362
5	Tegal Sari	Wono- kromo	780	487	29	339 8	145 5	194 3	2	37	238	155	2388	113	465	339 8	136	67	157	293	1	126	780

4.3. Program Lanjut Usia Kota Surabaya

Program dan kegiatan Lanjut Usia pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Lembaga Sosial peduli dengan Program dan Kegiatan Lansia meliputi:

1. Dinas Sosial Kota Surabaya
2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya
3. Dinas Pendidikan Kota Surabaya
4. Bapetikom Kota Surabaya
5. Bappemas & KB Kota Surabaya
6. Gerontologi Abiyoso Kota Surabaya

1. Dinas Sosial (Dinsos)

Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka kepeduliaannya Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya (DINSOS), dalam memberdayakan Lansia di antaranya sebagai berikut:

- Pelayanan Advokasi dan pendampingan para Lanjut Usia yang terlanter tidak punya uang untuk pulang ke daerah asalnya.
- Pelayanan apabila ada tindak kekerasan.
- Pendampingan dipanti jompo apabila tidak mempunyai keluarga, di Surabaya/Keputih untuk Gepeng.
- Pusat Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia belum ada pengukuhan.
- Jaminan sosial untuk Lanjut Usia sebesar Rp. 300.000,00 (APBN Pusat).
- Pemberian makanan tambahan bagi Lanjut Usia.
- Pembinaan panti jompo milik swasta.
- Mengadakan kegiatan Pra Lansia (usia 40-50 tahun), untuk keluarganya bagaimana merawat lansia diadakan pelatihan untuk petugas kelurahan dan kecamatan di Dinsos.
- Pembinaan kelompok-kelompok di luar Karang Werda.
- Memberikan tali asih.
- Mengadakan Gelar Lansia.

2. Dinas Kesehatan (Dinkes)

Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka kepeduliaannya Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya (DINKES), dalam memberdayakan Lansia di antaranya sebagai berikut:

- Pelayanan kesehatan bagi lansia.
- Pelayanan kesehatan untuk lansia gakin gratis, nongakin dikenakan biaya.
- Pelayanan di posyandu gratis, dan yang datang di posyandu sekitar 30% sampai dengan 40% dari lansia yang ada (menurut data puskesmas).
- Posyandu lansia sebanyak 241 dari 31 Kecamatan Posyandu 50 lansia.
- Pelayanan di loket lansia didahulukan, untuk kesehatan jasmani diadakan senam lansia, dipantau BB, TB untuk memantau lansia semakin bungkuk/ tidak untuk mengetahui oestoporosis pada lansia.
- Kunjungan ke lansia 4 kali dalam satu tahun karena tenaga puskesmas terbatas.
- Untuk anggaran 2009 diusulkan snack (mamin) untuk hari buka posyandu lansia, untuk kader lansia diusulkan transport selama 6 (enam) bulan untuk 5 kader per posyandu.

3. Dinas Pendidikan (Dindik)

Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka kepeduliaannya Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya (DINDIK), dalam memberdayakan Lansia di antaranya sebagai berikut:

- PLS (Pendidikan Luar Sekolah)
- Wirausaha.
- Pelatihan-pelatihan. Dinas pendidikan mempunyai orang-orang yang profesional, untuk mengolah makanan, dan mudah dipasarkan.
- Olahraga, bidang seni untuk lansia. Karena lansia ingin tenang, aman dan terlindungi, dari PLS bisa membantu pijat refleksi, tusuk jarum.
- PLS (Pendidikan Luar Sekolah)

4. Bapetikom

Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka kepeduliaannya Pemerintah Kota Surabaya melalui BAPETIKOM Kota Surabaya, dalam memberdayakan Lansia di antaranya sebagai berikut:

- Bapetikom menyesuaikan kegiatan-kegiatan.
- Mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas.
- Bapetikom berpendapat dengan yang lain dan sangat mendukung
- Kalau ada kegiatan Bapetikom supaya diberi tembusan untuk diliput dan dipublikasikan.
- Perlu adanya kesepakatan data untuk dipublikasikan.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana (Bappemas & KB)

Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka kepeduliaannya Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPPEMAS & KB) Kota Surabaya membentuk sebuah wadah dalam bentuk “Bina Keluarga Lansia”, adapun kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka memberdayakan Lansia di antaranya sebagai berikut:

- Membina keluarga Lansia untuk merawat anggota keluarganya yang Lansia; dan
- Peran keluarga dalam merawat Lansia secara baik dan telaten.

6. Gerontologi Abiyoso Kota Surabaya

Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka kepeduliaannya Pemerintah Kota Surabaya melalui Gerontologi Abiyoso Kota Surabaya, dalam memberdayakan Lansia di antaranya sebagai berikut:

- Pertumbuhan karang werda, di 163 kelurahan yang ada 156 kelurahan menurut data Dinsos.
- Pada tanggal 15 November 2006 diadakan temu karsa yang tercatat hanya 57 kelurahan.
- Mengadakan lomba paduan suara, gerak jalan lansia.

4.4. Profil Lanjut Usia Binaan Kota Surabaya

Profil Lansia yang dalam binaan Puskesmas Dr. Soetomo untuk Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran seperti pada tabel 4.20 di bawah ini:

Tabel: 4.20

Data Dasar Lansia Puskesmas Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari - Tahun 2010

RW	Pra Lansia	Lansia	Lansia Resti
IV	271	127	53
VI	389	151	89
VII	298	98	75
Jumlah			217

Sumber: Puskesmas Dr. Soetomo Kel. Wonorejo - Oktober 2010

Program Puskesmas Dr. Soetomo dalam Pembinaan Lansia meliputi:

1. Posyandu Lansia : - Pengobatan : Ukur Tensi, TB, BB
2. PMT Lansia : 8 RW (2 Kelurahan)
3. Penyuluhan : - Hipertensi
- Rematoid Arthritis
- DM
- Jantung

Tabel: 4.21

NAMA KELOMPOK LANSIA BINAAN DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA S/D TH 2008

KEC. / Kelurahan	Nama Kelompok	Th. Berdiri	Alamat Sekretariat	Jumlah Anggota / Pengurus	Progrm Kegiatan
1. Kenjeran / Tanah Kalikedinding	Cempaka Jaya	1998	Pogot jaya	106/6	- Olah raga - Gerak jalan
	Cempaka	2010	kedung cowek	6	
2. Tegal Sari/ Wonorejo	Bima Shakti	2005	Wonorejo IV / 48 (031)(5475452)	140/21	- Kesenian (vokal) - Senam Lansia - Kr. Wreda Berprestasi - Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
	Matahari		Puskesmas Posyandu Lansia RW VI	290 Th. 2010, 194 Lansia PMT	

Sumber: Data sekunder Dinsos di olah

Berdasar profil masyarakat Lanjut Usia tersebut di atas, meliputi Program dan kegiatan Lanjut Usia pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Lembaga Sosial peduli dengan program kegiatan Lansia. Program tersebut diharapkan

merupakan sistim yang terkoordinasi dalam pengelolaannya yang meliputi kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan aktualisasi, potensi dan permasalahan – permasalahan, sehingga akan mendukung dan menggerakkan program pemberdayaan Lanjut Usia. Sistim tersebut adalah:

1. Saling berkoordinasi dalam menyusun, menganalisis dan mengelola serta mendistribusikan data-data tentang potensi dan permasalahan Lanjut Usia ke kelompok-kelompok Lanjut Usia, dinas terkait dan stakeholders yang menangani Lanjut Usia
2. Menyusun program dan kegiatan dan anggaran yang berperspektif Lanjut Usia (menyusun program kebutuhan Lanjut Usia/pengarusutamaan Lanjut Usia) serta mendistribusikan ke kelompok-kelompok Lanjut Usia, dinas terkait dan stakeholders yang menangani Lanjut Usia sesuai dengan potensi dan permasalahannya
3. Saling mendukung untuk melaksanakan program dan kegiatan berperspektif Lanjut Usia, keluarga dan masyarakat.
4. Saling berkoordinasi antara individu dan kelompok-kelompok Lanjut Usia, stakeholders dan dinas sektor untuk menyatukan visi dan misi pemberdayaan Lanjut Usia dalam program-program dan kegiatan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Lanjut Usia.
6. Bersama dengan legislative, yudikatif bagian hukum dan walikota menyusun produk-produk hukum untuk perlindungan Lanjut Usia.
7. Membentuk pusat kegiatan sehat dan mandiri / pusat aktualisasi diri pada lembaga, organisasi atau komunitas yang sudah ada, atau lokasi yang belum ada lembaga atau komunitasnya secara baik.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan *indepth interview* yang disertai alat bantu dengan menggunakan pedoman kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan data, informasi lengkap dan rinci mengenai objek dan masalah dari responden yang sudah ditentukan. Di antaranya hasil dari lapangan mengenai profil masyarakat Lanjut Usia (Lansia) dan keluarganya adalah untuk menggambarkan keadaan eksisting Lansia mulai dari identitas diri, kondisi sosial ekonomi sampai dengan harapan yang akan diraih dalam memberdayakan diri. Berikut ini akan digambarkan profil Lansia sebagai responden terpilih yang ditampilkan melalui beberapa tabel-tabel berikut di bawah ini:

5.1 Mengidentifikasi Lansia Miskin Dan Keluarga (Prioritas Program Pemberdayaan) Kota Surabaya

Untuk mengidentifikasi Lansia miskin dan keluarganya maka identitas responden dan keluarganya adalah sangat penting untuk diketahui. Dengan diketahui identitas diri Lansia dan keluarganya maka dapat diketahui pula status sosial keluarga tersebut. Hal ini penting untuk merencanakan program prioritas yang sesuai dengan kemampuannya.

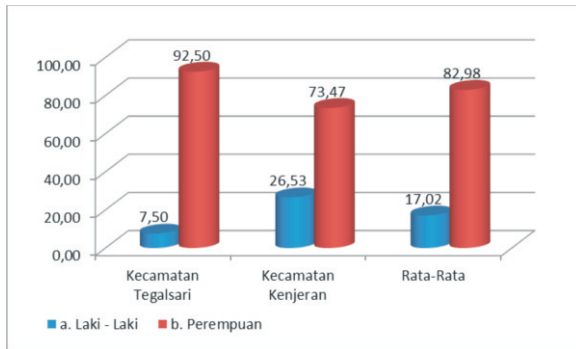
Tabel: 5.1
Identitas Responden di Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari

No	Uraian	Kecamatan	
		Kenjeran (Kel. Tanah Kalikedinding)	Tegalsari (Kel. Wonorejo)
1	Sex		
	Laki-laki	26,53	7,50
	Perempuan	73,47	92,50
2	Umur	62,67	57,79
3	Pendidikan		
	a. Tidak Tamat SD	36,2	37,1
	b. SD	42,6	48,6
	c. SLTP	21,3	11,4
	d. SLTA	-	2,9
	e. Diploma	-	-
	f. Sarjana	-	-

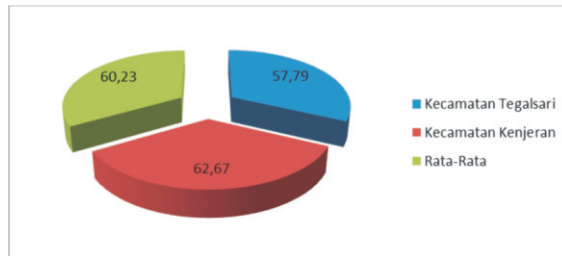
Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel 5.1 dapat digambarkan bahwa responden yang berasal dari Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran mayoritas dihuni oleh Lansia kaum perempuan sebanyak 73,47 persen sedangkan Lansia kaum laki-laki sebesar 26,53 persen dengan rata-rata umur sekitar 62,67 tahun (63 tahun).

Sedangkan untuk Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari juga sama dihuni mayoritas Lansia, kaum perempuan sebanyak 92,50 persen sedangkan kaum laki-laki sebesar 7,50 persen; dengan rata-rata umur sekitar 57,79 tahun (58 tahun). Berdasarkan dari data tersebut Kelurahan Wonorejo jumlah perempuannya lebih banyak dan rata-rata umurnya juga lebih muda bila dibandingkan dengan Kelurahan Tanah Kalikedinding. Secara lebih lengkap terlihat pada gambar di bawah ini.

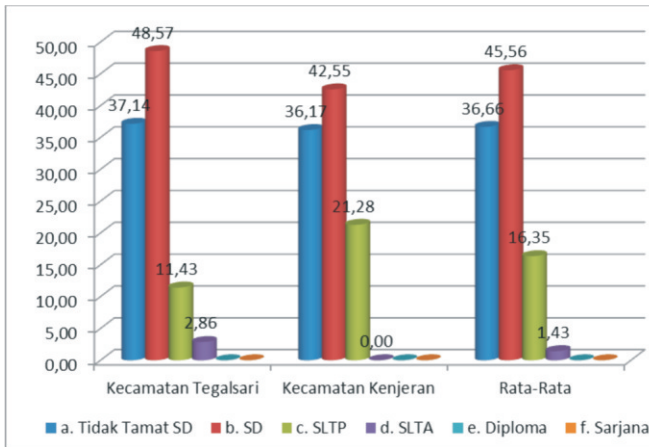


Gambar: 5.1
Jenis Kelamin Responden



Gambar: 5.2
Usia Responden (tahun)

Kalau dilihat dari tingkat pendidikannya Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran mayoritas pendidikan responden yang tidak tamat SD cukup tinggi sekitar 36,2 persen; 42,6 persen tamat SD; dan 21,3 persen tamat SMP. Sedangkan untuk Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari tidak beda jauh dari Kelurahan Tanah Kalikedinding tetapi sebagian responden sudah tamat SLTA, yaitu tidak tamat SD cukup tinggi sekitar 37,1 persen; 48,6 persen tamat SD; dan 11,4 persen tamat SMP dan 2,9 persen tamat SLTA. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.3
Pendidikan Responden

5.2. Mengidentifikasi Persyaratan Teknis Manajemen dan Kelembagaan Dari Berbagai Kegiatan Ekonomi yang Layak Dijadikan Prioritas

Dalam proses pemberdayaan masyarakat apalagi masyarakat Lansia dan keluarganya membutuhkan persyaratan khusus baik menyangkut persyarat teknis manajemen maupun kelembagaan. Oleh karena sifatnya yang khusus ini diperlukan pemahaman yang khusus pula. Sebelum bisa diketahui kemampuan dalam teknis manajemen dan kelembagaan perlu diketahui lebih dulu kondisi ekonomi Lansia dan keluarganya.

5.2.1. Kondisi Ekonomi Lansia dan Kegiatannya

Kondisi umum ekonomi responden pada umumnya kurang sampai dengan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan penghasilannya sangat rendah, bahkan ada yang tidak berpenghasilan. Berikut ini ditrampilkan kondisi ekonomi responden seperti pada tabel 5.2 berikut:

Tabel: 5.2
Kondisi Ekonomi Responden Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari

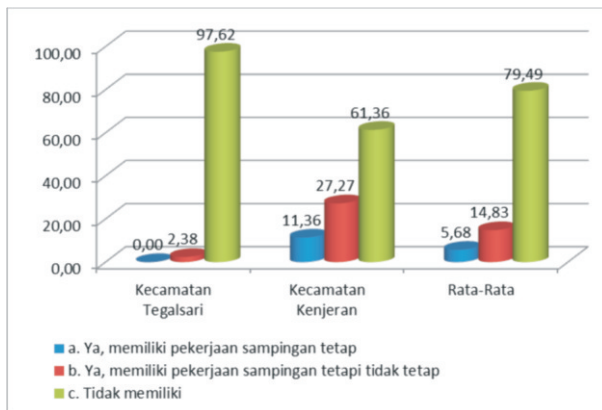
	Uraian	Kecamatan	
		Kenjeran (Kel. Tanah Kalikedinding)	Tegalsari (Kel. Wonorejo)
1	Rata-rata pendapatan responden per-bulan	Rp 123.600	-
2	Apakah responden memiliki pekerjaan sampingan		
	a. ya, memiliki pekerjaan sampingan tetap	11,4	-
	b. ya, memiliki pekerjaan sampingan tetapi tidak tetap	27,3	2,4
	c. tidak memiliki pekerjaan sampingan..... Jika memiliki, sebutkan.....	61,4	97,6
3	Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup?		
	a. Kurang	51,2	66,7
	b. Pas-pasan	36,6	33,3
	c. Cukup	12,2	-
	d. Lebih dari cukup	-	-
4	Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, upaya apa yang dilakukan oleh responden?		
	a. Mengurangi frekuensi makan	30,2	11,9
	b. Mengurangi kualitas menu makanan	65,1	76,2
	c. Mengurangi uang jajan anak	-	11,9
	d. Mengurangi uang jajan ayah	-	-
	e. Mengurangi uang jajan ibu	4,7	-
5	Apakah usaha yang dilakukan responden akhir-akhir ini mengalami kemajuan?		
	a. Tidak mengalami kemajuan	77,6	76,2
	b. Sedikit lebih maju	14,3	19,0
	c. Mengalami kemajuan	2,0	-
	d. Mengalami kemunduran	6,1	4,8
	e. Terancam bangkrut	-	-
6	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saat ini dibandingkan dengan keadaan sebelumnya?		
	a. Jauh lebih baik	6,1	-
	b. Lebih buruk	10,2	9,5
	c. Sama saja	71,4	83,3
	d. Lebih baik	12,2	7,1
	e. Jauh lebih baik	-	-
7	Apakah ada kesempatan/ peluang mencari pekerjaan di luar pekerjaan pokok selama ini (tersebut diatas)?		
	a. Tidak ada sama sekali	65,3	92,9
	b. Sangat terbatas	8,2	-
	c. Ada, tetapi sulit	22,4	7,1
	d. Cukup tersedia kalau mau berusaha	4,1	-
	e. Tersedia cukup banyak	-	-
8	Bagaimana sikap yang dipilih responden, disaat pendapatan kurang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari?		
	a. Mengambil uang dari tabungan	2,2	-
	b. Menggadaikan barang	-	17,1
	c. Meminjam ke kerabat/ keluarga	62,2	82,9
	d. Lainnya sebutkan.....	35,6	-

Sumber: Pengolahan data primer

Hasil dan Pembahasan

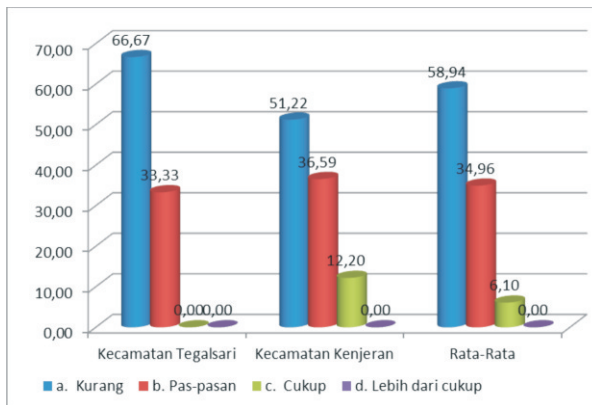
Kondisi Ekonomi Responden di Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari Pada tabel 5.2 tersebut di atas dilihat dari sisi penghasilan Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran menyatakan setiap bulannya rata-rata berpenghasilan Rp 123.600,00. Sedangkan kondisi Ekonomi Responden untuk Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari tidak ada gambaran penghasilan didapat atau tidak mau menyebutkan, karena berdasarkan pengamatan di lapangan dari gambaran keadaan yang ada umumnya sangat rendah.

Sedangkan terkait dengan pekerjaan sampingan, untuk responden Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran kalau ditanya “apakah responden memiliki pekerjaan sampingan” rata-rata responden menjawab 11,4 persen memiliki pekerjaan sampingan tetap; sebanyak 27,3 persen responden memiliki pekerjaan sampingan tetapi tidak tetap; dan sebanyak 61,4 persen responden tidak memiliki pekerjaan sampingan. Pada umumnya responden Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran memiliki pekerjaan sebagai pedagang nasi dan jahit. Sedangkan untuk responden Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari rata-rata sebanyak 2,4 persen responden memiliki pekerjaan sampingan tetapi tidak tetap; dan sebanyak 97,6 persen responden tidak memiliki pekerjaan sampingan. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.4
Apakah responden memiliki pekerjaan sampingan?

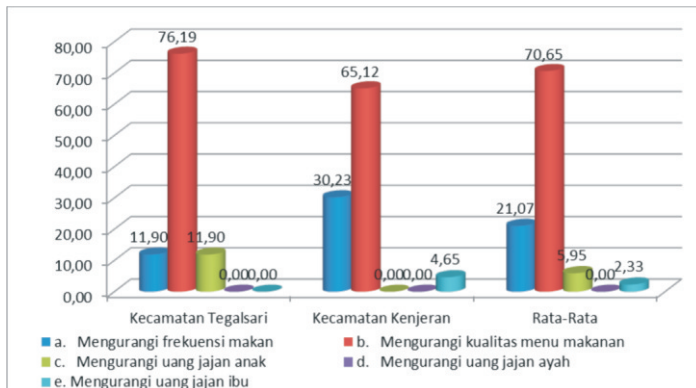
Responden yang memiliki penghasilan, yang diperoleh tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rata-rata responden baik dari Kelurahan Tanah Kalikedinding mengatakan kurang yaitu sebanyak 51,2 persen responden; yang mengatakan berpenghasilan pas-pasan sebanyak 36,6 persen; dan yang mengatakan berpenghasilan cukup sebanyak 12,2 persen. Sedangkan Kelurahan Wonorejo responden yang memiliki penghasilan kurang sebanyak 66,7 persen; dan yang memiliki penghasilan pas-pasan sebanyak 33,3 persen. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.5

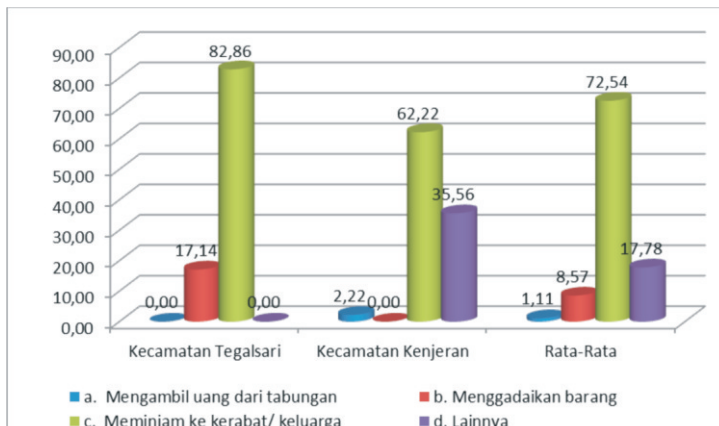
Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup?

Lebih lanjut responden menyampaikan, yang mana pada umumnya responden dalam menyiasati kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar dengan mengurangi frekuensi makan menjadi dua kali sehari, siang dan sore saja dan merubah menu makan sehari-hari serta meminjam uang dari kerabat, menggadaikan barang serta mengharapkan bantuan keluarga dan anak. Keterbatasan ekonomi yang membuat Lansia mesti menyesuaikan dengan makan seadanya. Kerabat yang menyajikan makanan umumnya anak, menantu, keponakan perempuan yang tinggal satu rumah/ berdekatan. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.6

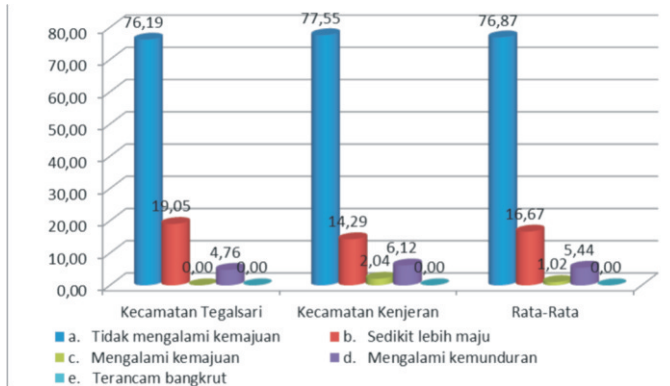
Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?



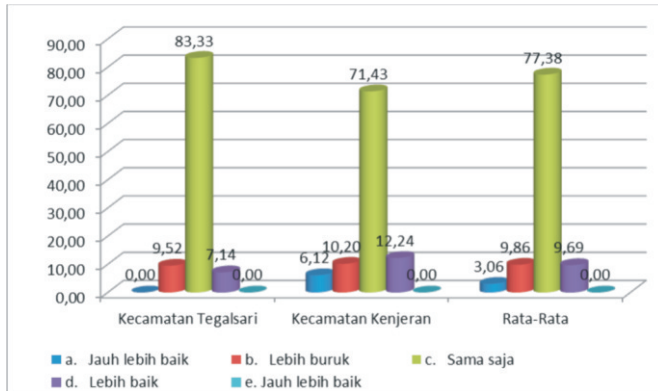
Gambar: 5.7

Tindakan responden pada saat pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari?

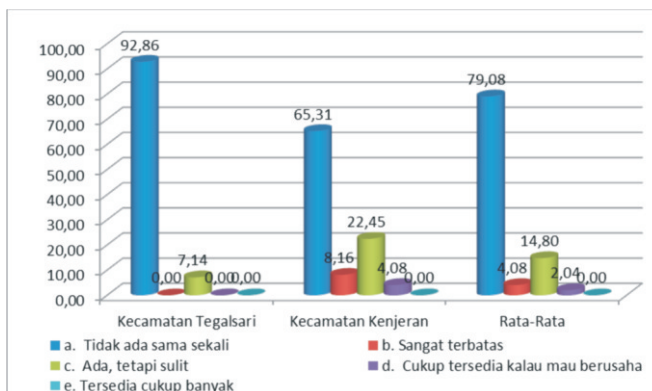
Pada saat kegiatan ini berlangsung, untuk responden yang mempunyai pekerjaan berdagang dan jenis pekerjaan lainnya pada umumnya kalau ditanya tentang kemajuan usaha selama ini sebagian besar menjawab tidak lebih baik dari tahun yang lalu, dan sebagian kecil saja yang mengalami kemajuan dan bahkan ada yang mengalami kemunduran. Sedangkan kalau responden ditanya peluang kerja diluar, sebagaian besar mengatakan tidak ada peluang sama sekali dan walaupun ada sangat sulit sekali. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.8
Kemajuan usaha responden



Gambar: 5.9
Kondisi ekonomi keluarga saat ini dibandingkan dengan keadaan sebelumnya



Gambar: 5.10
Apakah ada kesempatan/ peluang mencari pekerjaan di luar pekerjaan pokok selama ini

5.2.2. Kegiatan Ekonomi Yang Layak Dijadikan Prioritas

Jenis pekerjaan yang ditekuni dan berlangsung berkesinambungan dan lama menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut memberikan nilai manfaat bagi kehidupan mereka, oleh karena itu kinerja tersebut dapat dipakai sebagai indikator kegiatan ekonomi masyarakat yang prioritas. Berikut ini akan disajikan jenis pekerjaan responden yang ditekuni di wilayah studi.

Tabel: 5.3

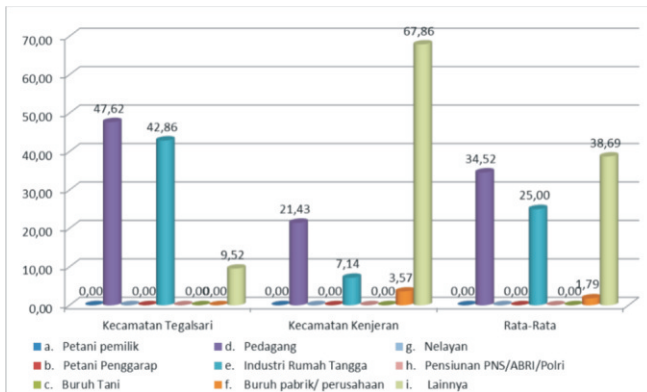
Jenis Pekerjaan Responden Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari

No	Uraian	Kecamatan	
		Kenjeran (Kel. T.Kaliked d)	Tegalsari (Kel. Wonorejo)
1	Pekerjaan		
	a. Petani pemilik		
	b. Petani Penggarap		
	c. Buruh Tani		
	d. Pedagang	21,4	47,6
	e. Industri Rumah Tangga	7,1	42,9
	f. Buruh pabrik/ perusahaan	3,6	-
	g. Nelayan	-	-
	h. Pensiunan PNS/ABRI/Polri	-	-
	i. Lainnya, sebutkan	67,9	9,5

Sumber: Pengolahan data primer

Selanjutnya dari aktivitas perekonomian responden, pekerjaan yang dimiliki oleh responden adalah pedagang, industri rumah tangga dan buruh. Untuk Kelurahan Tanah Kalikedinding yang memiliki usaha sebagai pedagang 21,4 persen, selanjutnya yang memiliki aktivitas pada industri rumah tangga 7,1 persen, dan buruh 3,6 persen, sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya merupakan jawaban responden Kelurahan Tanah Kalikedinding yang mempunyai persentasi terbesar yaitu 67,9 persen di antaranya jenis usaha: warung nasi, jual bensin eceran, buruh cuci, serabutan dan yang terbanyak pada pekerjaan lainnya ini adalah sebagai ibu rumah tangga.

Selanjutnya untuk aktivitas perekonomian responden Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari memiliki usaha sebagai pedagang sebanyak 47,6 persen, memiliki aktivitas pada industri rumah tangga sebanyak 42,9 persen, sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya sebesar 9,5 persen meliputi jualan, sebagai buruh cuci, “serabutan” dan juga sebagai ibu rumah tangga. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.11
Pekerjaan Responden

Dengan melihat hasil jawaban dari para responden menunjukkan bahwa baik di Kelurahan Tanah Kalikedinding dan Kelurahan Wonorejo memperlihatkan kecenderungan jenis pekerjaan yang ditekuni adalah pedagang dan industri rumah tangga. Artinya kemampuan skiil/ managerial disekitar pekerjaan yang selama ini ditekuni dan terbukti sampai dengan saat ini masih eksis.

5.3. Fungsional Strategik Kegiatan Ekonomi Layak Dijadikan Prioritas Utama Dan Tugas Unit-Unit Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Pelaksana

5.3.1. Fungsi Strategik Kegiatan Ekonomi

Isu strategis pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) dan keluarganya dimaksudkan untuk mengetahui kemauan masyarakat Lansia dalam hal apa dan bagaimana pemberdayaan itu dilaksanakan, sehingga ketika orang menjadi tua (Lansia) tetap berharap status sosial ekonominya tidak berubah. Namun, tetap mempertimbangkan aspek kualitas hidup yang berdaya dan mandiri, sehingga hidupnya menjadi bermanfaat dan berkualitas. Karena, beberapa profil responden Lansia yang ditemui ada yang masih potensial, dan bahkan lebih banyak yang sudah tidak potensial. Untuk itu di bawah ini akan disajikan hal-hal yang dimaksud seperti yang ditampilkan dalam bentuk tabel 5.4 berikut:

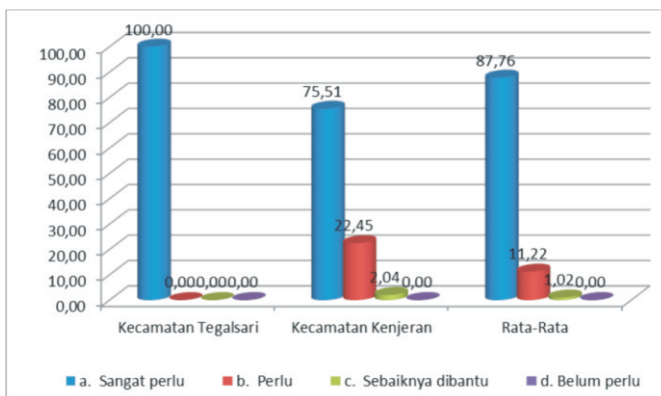
Tabel: 5.4
Isu-isu Strategis yang di sampaikan kepada Responden
di Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tegalsari

No	Uraian	Kecamatan	
		Kenjeran (Kel. T. Kalikedid)	Tegalsari (Kel. Wonorejo)
1	Apakah menurut responden, masyarakat perlu dibantu dalam meningkatkan ekonomi keluarganya? a. Sangat perlu b. Perlu c. Sebaiknya dibantu d. Belum perlu	75,5 22,4 2,1 -	100,0 - - -
2	Jenis bantuan yang dibutuhkan/ diharapkan? a. Bantuan permodalan untuk usaha b. Bantuan peralatan c. Bantuan bahan baku d. Bantuan sarana produksi (bibit, pupuk, obat hama, dll) e. Bantuan pemasaran produksi a. Lainnya sebutkan.....	44,9 - 4,1 46,9 2,0 - -	97,6 - 2,4 - - - -
3	Jenis keterampilan yang dimiliki oleh responden? a. Pertanian (jenis produk) b. pertukangan c. kerajinan/ industri kecil d. buruh bangunan e. sopir f. peternakan (jenis produk) g. Administrasi h. Lainnya sebutkan.....	8,7 - 21,7 - 8,7 - - 60,9	- 18,2 81,8 - - - - -
4	Alat produksi apa yang bisa dimanfaatkan oleh responden dan dimiliki oleh keluarga? a. Kendaraan bermotor b. Pekarangan/ sawah/ ladang/ tanah c. Perkakas pertukangan d. Mesin diesel e. Mesin jahit f. Perkakas perbengkelan g. Warung a. Lainnya sebutkan.....	16,7 - - - 19,2 4,2 29,2 20,8	- - 33,3 - 50,0 16,7 - -
5	Bila harus diselenggarakan sebuah pelatihan di lingkungan anda/ responden, jenis pelatihan dan keterampilan apa yang paling dibutuhkan saat ini? a. Pertukangan b. Cara bercocok tanam/hidroponik c. Per-bengkelan d. Kursus menjahit/menyulam e. Pemeliharaan dan budidaya ikan lele/ikan hias f. Lainnya sebutkan.....	- 18,8 12,5 56,3 - 12,5	30,0 - - 70,0 - -
6	Tantangan terbesar apa yang kemungkinan dihadapi responden dalam mengembangkan kegiatan usaha? a. masalah modal b. masalah tenaga kerja c. masalah biaya produksi d. masalah pemasaran e. masalah sarana produksi (lahan, mesin, dll) f. Lainnya sebutkan.....	82,6 8,7 - - 4,3 4,3	100,0 - - - - -

Sumber: Pengolahan data primer

Ketika orang menjadi tua (Lansia) tetap berharap status sosial ekonominya tidak berubah dratis dan tetap dihormati, tetapi secara fisik tidak mampu apalagi tidak mempunyai ketrampilan tertentu, sehingga tidak terjangkau oleh program-program yang ada. Apalagi jika kondisi Lanjut Usia yang rentan secara psikis, membutuhkan lingkungan yang mengerti dan memahami mereka. Pada tabel 5.4 tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam memberdayakan masyarakat Lansia untuk menunjang ekonomi keluarga, mereka butuh bantuan. Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, responden Lansia yang ditemui ada yang masih potensial, dan bahkan lebih banyak yang sudah tidak potensial, namun memiliki semangat untuk mandiri, dalam arti mampu memenuhi minimal kebutuhan dasar sehari-hari. Bagi yang masih potensial, diberikan kesempatan untuk bekerja dan berharap memberi dukungan dana, ketrampilan, bimbingan dari pemerintah, organisasi sosial maupun kelompok peduli.

Hasil wawancara dengan responden berkaitan perlu tidaknya Lansia dibantu untuk menunjang ekonomi keluarganya, baik di Wilayah Kelurahan Kedinding Kecamatan Kenjeran maupun di wilayah Kelurahan Wonorejo rata-rata menjawab “perlu”, bahkan untuk Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari 100 persen mengatakan perlu. Ini membuktikan bahwa mereka masih mempunyai semangat dan harapan perlunya program pemberdayaan Lansia sebagai salah satu penguatan ekonomi. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

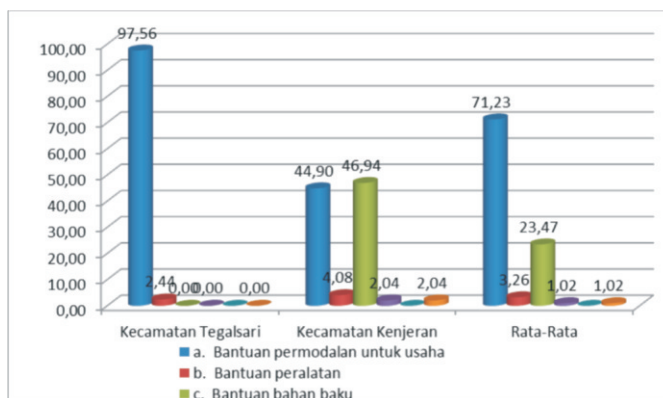


Gambar: 5.12

Apakah menurut responden, masyarakat perlu dibantu dalam meningkatkan ekonomi keluarganya?

Hasil dan Pembahasan

Bantuan yang diharapkan responden rata-rata mengatakan bentuk bantuan modal, bantuan peralatan, dan bantuan bahan baku. Untuk Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran responden membutuhkan bantuan modal sebesar 44,9 persen; yang membutuhkan bantuan peralatan sebanyak 4,1 persen; dan yang membutuhkan bantuan bahan baku sebesar 46,9 persen. Sedangkan untuk Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari ada dua kebutuhan responden untuk mendukung kegiatan ekonominya yaitu, membutuhkan bantuan modal sebesar 97,6 persen; dan membutuhkan bantuan peralatan sebesar 2,4 persen. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

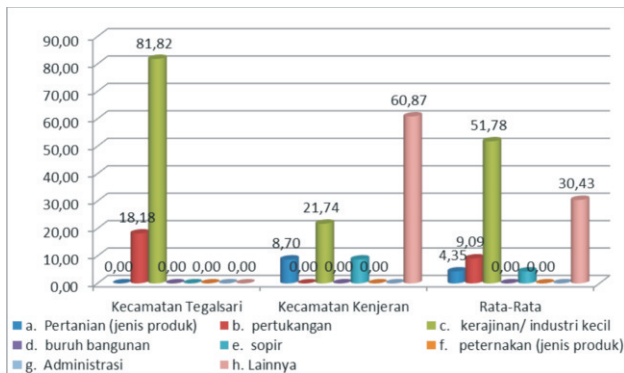


Gambar: 5.13
Jenis bantuan yang dibutuhkan/ diharapkan?

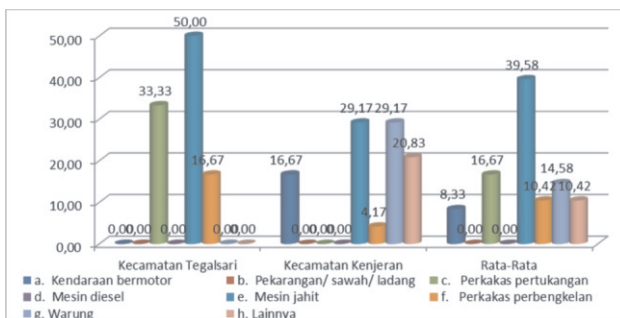
Adapun jenis ketrampilan yang dikuasai oleh responden Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran adalah jenis usaha pertanian sebanyak 8,7 persen; yang memiliki ketrampilan kerajinan sebanyak 21,7 persen; memiliki ketrampilan sebagai sopir sebanyak 8,7 persen; dan yang memiliki ketrampilan lainnya sebesar 60,9 persen meliputi ketrampilan: memasak, bikin kue, menjahit, pijat, usaha dirumah, berdagang, dan jual bensin eceran. Sedangkan untuk responden di Kelurahan Wonorejo yang memiliki ketrampilan pertukangan sebanyak 18,2 persen, dan yang memiliki ketrampilan kerajinan/industri kecil sebanyak 81,8 persen.

Sedangkan bentuk ketrampilan yang diharapkan oleh responden Kelurahan Tanah Kalikedinding adalah pertukangan

sebanyak 18,8 persen; bercocok tanam *hidroponik* sebesar 12,5 persen; responden yang mengharapkan dapat bantuan kursus menjahit/menyulam sebesar 56,3 persen; dan responden yang berharap dalam bentuk bantuan lainnya sebesar 12,5 persen yaitu meliputi ketrampilan: memasak dan menjadi pedagang. Sedangkan untuk responden di Kelurahan Wonorejo mengharapkan dapat bantuan ketrampilan pertukangan sebesar 30 persen; dan yang mengharapkan dapat bantuan ketrampilan menjahit/menyulam sebanyak 70 persen. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 5.14
Jenis keterampilan yang dimiliki oleh responden?

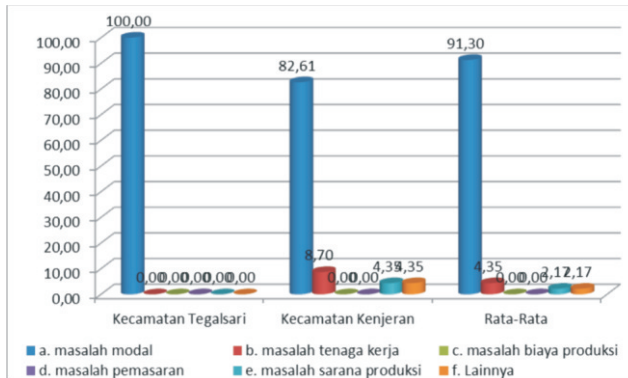


Gambar: 5.15
Alat produksi yang bisa dimanfaatkan oleh responden dan dimiliki oleh keluarga?

Tantangan terbesar masyarakat Lansia di Kelurahan Tanah Kalikedinding dalam mengembangkan usaha ekonominya selain ketrampilan adalah modal yaitu sebanyak 82,6 persen; masalah selanjutnya adalah terkait tenaga kerja sebesar 8,7 persen; masalah

Hasil dan Pembahasan

sarana produksi sebesar 4,3 persen; dan yang menjadi masalah lainnya sebesar 4,3 persen seperti masalah kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan untuk responden di Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari 100 persen menyebutkan masalah modal yang menjadi tantangan untuk pengembangan usahanya.



Gambar: 5.16
Tantangan terbesar apa yang kemungkinan dihadapi Responden dalam mengembangkan kegiatan usaha?

5.3.2. Peran Pemerintah

Pemberdayaan Masyarakat Lansia menjadi tanggungjawab kita semua bukan saja tanggungjawab pemerintah. Kepedulian pemberian hak-hak sebagai bentuk apresiasi terhadap Lansia untuk menjaga harkat dan martabatnya merupakan prioritas yang harus ditindak-lanjudi secara terus menerus. Peranan pihak-pihak yang terlibat (*stakeholder*) baik keluarga, masyarakat, dan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses pemberdayaan. Khususnya berikut ini akan ditampilkan harapan responden Lansia terhadap peran pemerintah dalam proses pemberdayaan. Dalam tabel 5.5 di bawah ini akan ditampilkan jawaban responden terhadap peran pemerintah jika memberikan bantuan:

Tabel: 5.5

Jawaban Responden Terhadap Peran Pemerintah dalam Program Bantuan

No	Uraian	Kecamatan	
		Kenjeran	Tegalsari
1	Kalau pemerintah memberikan bantuan, apa rencana responden?		
	a. Membuka usaha baru	50,0	7,3
	b. Mengembangkan usaha yang sudah ada	39,6	92,7
	c. Lainnya sebutkan	10,4	-
2	Jika membuka usaha, maka jenis usaha seperti apa yang akan ditekuni oleh responden?		
	a. Harus berbeda dengan usaha terdahulu	61,0	2,4
	b. Sama dengan usaha yang selama ini ditekuni	24,4	66,7
	c. Berbeda tetapi masih satu rumpun usaha	14,6	31,0
3	Jika pemerintah harus memberikan bantuan, atas dasar apa bantuan itu diberikan?		
	a. Bantuan untuk per-Kepala Keluarga	69,4	-
	b. Bantuan per-jenis usaha	28,6	100,0
	c. Bantuan berdasar jenis kelamin	2,0	-
4	Apabila pemerintah memberikan bantuan, bagaimana menurut responden apakah bantuan tersebut perlu dikembalikan atau tidak?		
	a. Tidak perlu dikembalikan	78,7	21,4
	b. Perlu dikembalikan dengan bunga relative kedl dan dicicil	2,1	4,8
	a. Perlu dikembalikan tanpa bunga dan dicicil	19,1	73,8
5	Dalam proses pengajuan bantuan, apakah perlu dilakukan model jaminan?		
	a. Perlu	18,2	4,8
	b. Tidak perlu	81,8	95,2
6	Dalam pelaksanaan program bantuan baik dari pemerintah maupun non pemerintah apakah perlu dilakukan pendampingan?		
	a. Perlu	73,8	100,0
	b. Tidak perlu	26,2	-
7	Apabila diperlukan adanya pendampingan berapa lama proses pendampingan itu diperlukan?		
	a. 1 bulan	25,7	50,0
	b. 2 sampai 3 bulan	11,4	42,9
	c. Lebih dari tiga bulan	62,9	7,1

Sumber: Pengolahan data primer

Beberapa variasi harapan Lansia yang tercermin dari jawaban responden atas pertanyaan, jika pemerintah meluncurkan bantuan program kepada masyarakat Lansia. Di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran rata-rata responden menjawab akan membuka usaha baru sebesar 50,0 persen; responden yang menjawab untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sebesar 39,6 persen; dan sebesar 10,4 persen responden menjawab untuk biaya hidup. Sedangkan di Wilayah Kelurahan Wonorejo sebesar 7,3 persen responden menjawab untuk membuka usaha baru, dan sebesar 92,7 persen responden menjawab untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.

Kaitan dengan jenis usaha yang dipilih apabila bantuan pemerintah terealisasi maka responden di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding menjawab sebanyak 60 persen harus “berbeda” dengan usaha sebelumnya (yang sedang dijalankan saat ini); sebesar 24,4 persen responden menjawab sama dengan usaha yang ditekuni saat ini; dan 14,6 persen responden menjawab berbeda tetapi masih satu rumpun dengan usahanya saat ini. Sedangkan responden di Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari menjawab sebanyak 2,4 persen harus berbeda dengan usaha terdahulu; sebanyak 66,7 persen responden menjawab sama dengan usaha yang ditekuni saat ini; dan sebesar 31,0 persen responden menjawab berbeda tetapi masih satu rumpun dengan usahanya saat ini.

Selanjutnya dalam *interview* di lapangan juga responden menjawab beberapa pertanyaan teknik atas dasar apa bagi penerima program mengenai bantuan pemerintah tersebut diluncurkan, maka untuk masyarakat Lansia di Kelurahan Tanah Kalikedinding menjawab sebanyak 69,4 persen diberikan berdasarkan per kepala keluarga; responden yang menjawab sebanyak 28,6 persen menghendaki berdasarkan jenis usaha; dan sebanyak 2,0 persen responden menghendaki bantuan diberikan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan untuk responden di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran menghendaki dengan tegas yaitu 100,0 persen berdasarkan jenis usaha.

Responden lebih lanjut menyampaikan, jika pemerintah memberikan bantuan seperti dimaksud di atas, apakah bantuan

tersebut perlu dikembalikan atau tidak dengan alasan untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Dari beberapa jawaban responden pada tabel 5.5 tersebut di atas, dapat diuraikan untuk Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding responden menjawab sebanyak 78,7 persen tidak perlu dikembalikan; sedangkan sebanyak 2,1 persen responden menjawab perlu dikembalikan namun dengan bunga rendah; dan sebanyak 19,1 persen responden menjawab dikembalikan dengan syarat tanpa bunga dan dicicil. Sedangkan jawaban dari masyarakat di Wilayah Kelurahan Wonorejo sebanyak 21,4 persen responden menjawab tidak perlu dikembalikan; sebanyak 4,8 persen responden menjawab perlu dikembalikan dengan bunga rendah; dan sebanyak 73,8 persen responden menjawab dikembalikan tanpa bunga dan dicicil.

Sedangkan terkait dengan penjaminan dalam proses pengajuan bantuan modal usaha. Kemudian diajukan pertanyaan terkait dengan perlu tidaknya dalam meluncurnya bantuan baik dari pemerintah maupun oleh pihak swasta bila diadakan penjaminan untuk responden di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran, dan responden di Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari mayoritas menjawab tidak perlu ada jaminan.

Salah satu pendekatan agar efektif dan efisiensi sebuah program adalah dengan dilakukannya pendampingan. Kaitan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan program bantuan modal jika program pemerintah tersebut di atas terlaksana seperti yang diharapkan oleh responden, perlu tidaknya dilakukan pendampingan baik di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding dan di Wilayah Kelurahan Wonorejo mayoritas responden menjawab perlu ada pendampingan, dan untuk lebih bermanfaat kelihatan hasil dari sebuah kinerja pendampingan sebaiknya dengan durasi waktu, yaitu bervariasi mulai 1 bulan sampai dengan lebih dari 3 bulan.

5.3.3. Tugas Unit-Unit Pemerintah Kota

Program dan kegiatan Lanjut Usia pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan tersebar di masing – masing SKPD, di antaranya:

Hasil dan Pembahasan

- Dinas Sosial Kota Surabaya
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Gerontologi Abiyoso Kota Surabaya
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- Bapetikom Kota Surabaya
- Bina Keluarga Lansia Bappemas dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Program – program tersebut adalah:

a. DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

- Pelayanan Advokasi dan pendampingan para Lanjut Usia yang terlanter tidak punya uang untuk pulang ke daerah asalnya.
- Pelayanan apabila ada tindak kekerasan.
- Pendampingan dipanti jompo apabila tidak mempunyai keluarga, di Surabaya/Keputih untuk Gepeng.
- Pusat Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia belum ada pengukuhan.
- Pemberian makanan tambahan bagi Lanjut Usia.
- Pembinaan panti jompo milik swasta.
- Mengadakan kegiatan Pra Lansia (usia 40-50 tahun), untuk keluarganya bagaimana merawat Lansia diadakan pelatihan untuk petugas kelurahan dan kecamatan di Dinsos.
- Pembinaan kelompok-kelompok di luar Karang Werda.
- Mengadakan Gelar Lansia.

b. DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

- Pelayanan kesehatan bagi Lansia.
- Pelayanan kesehatan untuk Lansia gakin gratis, nongakin dikenakan biaya.
- Pelayanan di posyandu gratis, dan yang datang di Posyandu sekitar 30% sampai dengan 40% dari Lansia yang ada (menurut data Puskesmas).
- Pelayanan di loket Lansia didahulukan, untuk kesehatan jasmani diadakan senam Lansia, dipantau BB, TB untuk memantau Lansia semakin bungkuk/tidak untuk mengetahui oestoporosis

pada Lansia.

- Kunjungan ke Lansia 4 kali dalam satu tahun karena tenaga puskesmas terbatas.

c. GERONTOLOGIABIYOSO KOTA SURABAY

- APertumbuhan karang werda, di 163 kelurahan yang ada 156 kelurahan menurut data Dinsos.
- Mengadakan lomba paduan suara, gerak jalan Lansia.

d. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- PLS (Pendidikan Luar Sekolah)
- Wirausaha.
- Pelatihan-pelatihan. Dinas pendidikan mempunyai orang-orang yang profesional, untuk mengolah makanan, dan mudah dipasarkan.
- Olahraga, bidang seni untuk Lansia. Karena Lansia ingin tenang, aman dan terlindungi, dari PLS bisa membantu pijat refleksi, tusuk jarum.

e. BAPETIKOM KOTA SURABAYA

- Bapetikom menyesuaikan kegiatan-kegiatan.
- Mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas.
- Bapetikom sependapat dengan yang lain dan sanga mendukung.
- Kalau ada kegiatan Bapetikom supaya diberi tembusan untuk diliput dan dipublikasikan.
- Perlu adanya kesepakatan data untuk dipublikasikan.

f. BINA KELUARGA LANSIA BAPPEMAS KB KOTA SURABAYA

- Membina keluarga Lansia untuk merawat anggota keluarganya yang Lansia.
- Peran keluarga dalam merawat Lansia secara baik dan telaten.

5.4. Mengidentifikasi Dan Merancang Program-Program Prioritas Pendukung Bagi Pemberdayaan Lansia Dan Keluarganya

Isu pemberdayaan saat ini sangat begitu kuat dan mengakar sehingga banyak dinas teknis yang terkait merencanakan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Dalam mengidentifikasi program – program pendukung dapat dilihat 2 hal yaitu identifikasi pemberdayaan Lansia dan pemberdayaan keluarga Lansia.

5.4.1. Identifikasi Pemberdayaan Lansia

Isu pemberdayaan Lansia erat hubungannya dengan keterbatasan baik kemampuan fisik maupun ketrampilan, oleh karena itu identifikasi jenis-jenis pelatihan yang akan diimplementasikan haruslah menyesuaikan dengan kemampuannya.

Tabel: 5.6

Jawaban Responden Terhadap Jenis Pelatihan dan Ketrampilan Yang Diharapkan

No	Uraian	Kecamatan	
		Kenjeran	Tegalsari
1	Pertukangan	-	3
2	Cara Berkebun	3	-
3	Perbengkelan	2	-
4	Kurus Menjahit/Menyulam	9	7
5	Budidaya Lele/Ikan Hias	-	-
6	Masak	2	4
7	Pedagang	1	1
8	Pengrajin kue	1	19

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tipologi daerah sangat berpengaruh terhadap jenis kegiatan yang diinginkan, seperti Kecamatan Tegalsari yang tipologi metropolis yang diwakili oleh Kelurahan Wonorejo banyak responden menginginkan pelatihan pembuatan macam-macam kue, sedangkan Kecamatan Kenjeran yang tipologi pesisir yang diwakili oleh Kelurahan Tanah Kalikedinding banyak responden yang menginginkan pelatihan menjahit/menyulam.

5.4.2. Identifikasi Pemberdayaan Keluarga Lansia

Di Kecamatan Kenjeran khususnya di Kelurahan Tanah Kalikedinding keluarga Lansia yang miskin kebanyakan kegiatannya bergerak *off farm* seperti jual bensin, pedagang kaki lima atau meracang, tukang becak dan tukang parkir. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberdayaan mutlak diperlukan dengan model bantuan pinjaman yang tidak memberatkan dan dapat diangsur dengan jangka waktu lama dan perlu pendampingan sampai dengan proses pemberdayaan dianggap berhasil.

Kecamatan Tegalsari khususnya di Kelurahan Wonorejo, maka pemberdayaan keluarga Lansia berbeda dengan Kecamatan Kenjeran. Dalam mengembangkan kemampuan diri, mereka berharap bahwa bantuan modal adalah hal utama dan bantuan tersebut merupakan bantuan hibah artinya tidak perlu dikembalikan, tetapi mereka sepakat pendampingan perlu dilakukan. Adapun pekerjaan yang ditekuni selama ini adalah tukang parkir, pedagang kaki lima dan tukang becak.

Hasil dan Pembahasan

Bab 6

Rancangan Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan

6.1. Strategi dan Kebijakan

6.1.1. Strategi

Strategi kebijakan dalam kajian pemberdayaan Lansia Berkualitas semestinya bersifat komprehensif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan multiaspek, baik yang bersifat *tangible* maupun yang *itangible*. Strategi pemberdayaan di maksud mestilah direncanakan sistematis dan terprogram, serta lintas sektoral. Berikut beberapa perumusan strategi dapat dikembangkan antara lain:

1. Penumbuhkan kesadaran kritis masyarakat Lansia sehingga dapat membangkitkan rasa percaya diri pada masyarakat bahwa mereka hidupnya menjadi berkualitas, mampu dan berdaya;
2. Memperluas kesempatan untuk memperoleh berbagai sumber daya kunci melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian, pembinaan usaha ekonomi, serta perbaikan sarana prasarana pendukung;
3. Pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif baru di lingkungan masyarakat Lansia, lebih diprioritaskan pelaksanaan melalui model kemitraan antara kelompok masyarakat Lansia dan usahawan lokal yang berhasil dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, sehingga benar-benar ada motor bagi pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan;
4. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memberdayakan masyarakat Lansia dan keluarganya yang dilakukan dengan menggalang kelompok keahlian, kelompok peduli, kelompok sosial dan kelompok masyarakat lain serta lembaga pemerintah untuk sama-sama memberdayakan masyarakat Lansia

Rancangan Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan

5. Pengembangan dan penerapan manajemen satu atap dalam proses perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat Lansia;
6. Guna mendukung pengembangan manajemen satu atap pemberdayaan masyarakat Lansia perlu didukung peran dan fungsi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

6.1.2. Kebijakan

Selanjutnya, jika strategi pemberdayaan telah dirumuskan secara rinci dan terintegrasi dengan komitmen tinggi pada seluruh *stakeholders* - baik pemerintah maupun masyarakat, maka yang harus menjadi fokus pemberdayaan selanjutnya adalah merumuskan kebijakan. Karena sebuah strategi mustahil akan berjalan dengan baik tanpa disertai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang antara lain meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Lanjut Usia yang menyangkut kebutuhan pangan, kesehatan dan papan.
- b. Pemberdayaan masyarakat Lanjut Usia melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.
- c. Peningkatan kemampuan, *skill*/ketrampilan dan wawasan dalam pengelolaan usaha.
- d. Peningkatan sarana pendukung kegiatan ekonomi produktif Lanjut Usia.
- e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi lembaga dalam penanganan program pemberdayaan Lanjut Usia /Lansia yang bernilai tinggi.

6.1. Program dan Kegiatan

Secara umum ada beberapa program kegiatan pemberdayaan Lanjut Usia berkualitas di Kota Surabaya secara komprehensif meliputi:

- a. Bantuan bahan makanan pokok bagi masyarakat Lansia. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini dilakukan melalui penjualan beras murah untuk keluarga miskin (raskin) atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan);
- b. Bantuan pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat Lansia. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini antara lain:

- Penyuluhan kesehatan berkesinambungan tentang “hidup menuju sehat”;
- Perbaikan gizi melalui pemberian makanan tambahan;
- Peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas, puskesmas pembantu maupun Polindes;
- c. Pembentukan Kelembagaan Usaha untuk mendorong efektivitas dan efisiensi usaha adalah kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini adalah Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- d. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pemberdayaan usaha Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:
 - Peningkatan Anggaran Belanja Daerah untuk penguatan modal usaha.
 - Meningkatkan akses pendanaan melalui lembaga keuangan;
- e. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini adalah:
 - Pelatihan tentang menggali dan meningkatkan potensi diri serta mengembangkan ide yang kreatif inovatif untuk mencapai prestasi (*Peak Performance*);
 - Pelatihan tentang bagaimana memulai usaha dengan tingkat keberhasilan tinggi (*Financial Revolution*);
 - *Field Trip* ke sentra-sentra produksi yang berhasil.
- a. Peningkatan layanan lembaga keuangan untuk akses modal usaha
 - Sosialisasi dan penyuluhan tentang kredit lunak dan persyaratan administrasi yang sederhana dan mudah;
 - Pemberian kredit tanpa jaminan baik melalui dana APBD maupun lembaga keuangan lainnya.

Rancangan Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan

7.1. Kesimpulan

Pemberdayaan (*empowerment*) Lansia ini dipastikan akan jauh memiliki *greget* sosiologis, ekonomi, maupun politik yang besar. Sebab dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Lansia bukan hanya dilayani dengan pasif namun aktif dan partisipatif. Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan yang bersumber dari data primer maupun data sekunder dari kegiatan ini, ada beberapa kesimpulan yang perlu di sampaikan antara lain:

1. Baik Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari:
 - Penduduknya mayoritas dihuni oleh kaum perempuan rata-rata umur sekitar antara 58 - 67 tahun;
 - Tingkat pendidikannya mayoritas berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD), kemudian disusul tidak tamat SD dan tamat SMP;
 - Pekerjaan yang dimiliki oleh responden di Kelurahan Tanah Kalikedinding didominasi oleh warung nasi, jual bensin eceran, buruh cuci, serabutan dan terbanyak adalah pekerjaan rumah tangga. Sedangkan untuk Wilayah Kelurahan Wonorejo memiliki pekerjaan sebagai industri rumah tangga;
 - Penghasilan responden/Lansia di Kelurahan Tanah Kalikedinding setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 123.600,00, sedangkan untuk Kelurahan Wonorejo tidak mau menyebutkan umumnya sangat rendah;
 - Responden tidak memiliki pekerjaan sampingan;
 - Penghasilan yang diperoleh tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya rata-rata responden baik dari Kelurahan Tanah Kalikedinding, maupun di Kelurahan Wonorejo rata-rata mengatakan kurang cukup, bahkan tidak cukup;
 - Pada umumnya responden dalam menyiasati kekurangan

Penutup

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar dengan mengurangi frekuensi makan, dan merubah menu makan sehari-hari serta meminjam uang dari kerabat, juga mendapatkan bantuan keluarga dan anak;

- Peluang kerja di luar untuk menambah penghasilan baik responden di Kelurahan Tanah Kalikedinding maupun Kelurahan Wonorejo mengatakan tidak ada peluang untuk usaha, dan walaupun ada sangat sulit sekali.
2. Adapun jenis ketrampilan yang dikuasai oleh responden Kelurahan Tanah Kalikedinding adalah:
- Masak, bikin kue, dan kerajinan/ industri kecil;
 - Bentuk ketrampilan yang diharapkan oleh responden Kelurahan Tanah Kalikedinding adalah kursus menjahit/menyulam;
 - Tantangan terbesar dalam mengembangkan usaha selain ketrampilan adalah modal usaha, sedangkan masalah teknis untuk mengembangkan usaha tidak begitu menonjol.
3. Kaitan dengan jenis usaha yang dipilih apabila bantuan pemerintah terealisasi maka baik responden di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding maupun di Wilayah Kelurahan Wonorejo adalah:
- Tidak berbeda dengan jenis usaha yang saat ini dilakukan;
 - Bantuan program pemberdayaan dari pemerintah yang diluncurkan untuk masyarakat Lansia mayoritas berpendapat bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan dan tidak perlu adanya jaminan;
 - Dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah masyarakat Lansia baik di Wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding dan di Wilayah Kelurahan Wonorejo perlu ada pendampingan.

7.2. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi program kegiatan yang perlu ditindaklanjuti dari hasil pembahasan kegiatan Kajian Pemberdayaan Lanjut Usia Berkualitas di Kota Surabaya, antara lain:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi program kegiatan Lansia di masing-masing SKPD yang berkelanjutan;
2. Mengevaluasi dan menindaklanjuti program yang memberikan nilai tambah Lansia;
3. Penguatan Ekonomi bagi keluarga Lansia yang lemah, agar ada peningkatan ekonomi dan dapat mencukupi kebutuhan Lansia;
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat Lansia yang potensial melalui penguatan kewirausahaan yang digeluti saat ini;
5. Menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif masyarakat Lansia sehingga mampu tumbuh kembang;
6. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam menunjang peningkatan usaha;
7. Memperkuat kelembagaan yang mampu memfasilitasi dan mendayagunakan masyarakat Lansia melalui penyediaan tempat sebagai wadah pusat pertemuan serbaguna;
8. Memfasilitasi masyarakat Lansia yang potensi dalam rangka melakukan kemitraan dengan dunia usaha.

Penutup

Daftar Pustaka

- Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya: Rancangan Model Pemberdayaan Lansia Kota Surabaya, tahun 2008
- Bryant C, dan White L.G., (1987), *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta, LP3ES
- Chambers, Robert., (1995), *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* IDS, Brighton, UK, IDS Discussion Paper, 347.
- Freire, P., (1994), *Pedagogy of hope: reliving pedagogy of the oppressed*, New York, NY: Continuum.
- Hamel, Gary and Prahalad, C.K., (1989), *Strategic Intent*, Harvard Business Review, 67(3);63.
- Hardywinoto, dan Setiabudhi T, (1999). *Panduan Gerontologi Menjaga Keseimbangan Kualitas Hidup Para Lanjut Usia*. Jakarta: PT Mekar Saudara Jaya Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantono N dan Supomo B., (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : Edisi Pertama BPFE Yogyakarta.
- Kartasasmita, (1997), *Kemiskinan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/1994. Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesusialan Kepada PEMDATingkat II.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 / HUK / 1998. Tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004. Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
- Martono, Heru., (2008), *Gerakan Nasional Pemberdayaan Lanjut Usia*, Gemari edisi 89 Tahun IX/Juni 2008.
- Miles, M.B., and Huberman A.M., (1994) *Qualitative Data Analysis: an*

Daftar Pustaka

Expanded Sourcebook, Thousand Oaks, Calif., Sage.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lansia di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pranarka A.M.W., dan Priyono O.S., (1996), "Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi", Jakarta, CSIS.

Profil Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran, Maret tahun 2010.

Profil Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Maret tahun 2010.

Salim, Emil., (1976), *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta

Suharto, Edi (2008c), *Trend Lansia dan Pelayanan Sosial yang Harus Disediakan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, makalah yang disajikan pada Lokakarya Kelanjut Usia dan Pelayanan Sosial Modern, Depsos RI, Bogor 23 Maret

Setiti SG, (2010), *Pelayanan Lanjut Usia Berbasis Kekerabatan* (Studi Kasus Pada Lima Wilayah Di Indonesia)

Surabaya Dalam Angka tahun 2009

Suryabrata S., (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Program Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahyudi, Agustinus., (1996), *Manajemen Strategik*, Jakarta, Binarupa Aksara

Yuhetty H, Sumadi T, dan Tim. *Pemberdayaan Lansia*.
<http://www.komnaslansia.or.id/>

Lansia Berkualitas

A. Pedoman Umum Wawancara

1. Berpakaianlah yang sopan.
2. Bertutur dan bersikaplah dengan sopan kepada masyarakat responden.
3. Ucapkan salam sebelum memulai pertanyaan serta perkenalkan diri dan maksud kedatangan anda.
4. Gali lebih banyak informasi masyarakat kondisi yang berkaitan dengan lansia yang mereka alami saat ini serta harapan mereka terhadap Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan pemberdayaan lansia dan keluarganya.
5. Pertimbangkan waktu yang efektif dan tidak mengganggu responden
6. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada responden atas bantuannya untuk terlibat dalam pengisian kuesioner ini.

B. Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah Pertanyaan dengan cermat dan beri jawaban yang sesuai dengan apa yang anda alami sekarang ini.
2. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang anda tepat bagi kondisi yang anda alami saat ini.
3. Anda bisa menjawab lebih dari satu jawaban bila diperlukan.
4. Isilah data tentang diri anda dengan lengkap.
5. Dan sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi anda dalam Strategi Pemberdayaan Lansia dan Keluarganya

C. Identitas Responden:

Isi dan lingkari kode huruf sesuai pilihan responden.

Nomor Responden	:	
Nama / Umur	:	 / Tahun
Jenis Kelamin	:	a. Laki Laki b. Perempuan
Status	:	a. Menikah b. Belum Menikah c. Janda/Duda
Pendidikan	:	a. Tidak Tamat SD c. SLTP e. Diploma b. SD d. SLTA f. Sarjana
Tempat Tinggal	:	a. Rumah Sendiri b. Sewa/Kontrak c. Dengan Keluarga
No Telp.	:	
Alamat	:	Jl. No. RT. RW.
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Pekerjaan	:	a. Petani pemilik lahan, sebutkan luas lahan, Ha b. Petani Penggarap f. Buruh pabrik/perusahaan c. Buruh Tani g. Nelayan d. Pedagang h. Pensiunan PNS/ABRI/Polri e. Industri Rumah Tangga Lainnya, sebutkan
Jumlah orang serumah	:	
Jumlah Anak	:	a. Laki-laki..... c. Saudara/Menantu..... d. Perempuan..... Jumlah Total.....
Anggota keluarga yang bekerja	:	a. Kepala Keluarga/Bapak c. Anak Laki/Perempuan b. Istri/Ibu d. Menantu

D. Kondisi Ekonomi Keluarga

- Berapa rata-rata pendapatan responden per-bulan?
Sebutkan.....
- Apakah responden memiliki pekerjaan sampingan:
 - ya, memiliki pekerjaan sampingan tetap
 - ya, memiliki pekerjaan sampingan tetapi tidak tetap
 - tidak memiliki
 Jika memiliki, sebutkan
- (dijawab jika pada pertanyaan nomer 2 dijawab a atau b)
Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup?

- a. Kurang
 - b. Pas-pasan
 - c. Cukup
 - d. Lebih dari cukup
4. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, upaya apa yang dilakukan oleh responden?
 - a. Mengurangi frekuensi makan
 - b. Mengurangi kualitas menu makanan
 - c. Mengurangi uang jajan anak
 - d. Mengurangi uang jajan ayah
 - e. Mengurangi uang jajan ibu
 5. Apakah usaha yang dilakukan responden akhir-akhir ini mengalami kemajuan?
 - a. Tidak mengalami kemajuan
 - b. Sedikit lebih maju
 - c. Mengalami kemajuan
 - d. Mengalami kemunduran
 - e. Terancam bangkrut
 6. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saat ini dibandingkan dengan keadaan sebelumnya?
 - a. Jauh lebih baik
 - b. Lebih buruk
 - c. Sama saja
 - d. Lebih baik
 - e. Jauh lebih baik
 7. Apakah ada kesempatan/ peluang mencari pekerjaan di luar pekerjaan pokok selama ini (tersebut diatas)?
 - a. Tidak ada sama sekali
 - b. Sangat terbatas
 - c. Ada, tetapi sulit
 - d. Cukup tersedia kalau mau berusaha
 - e. Tersedia cukup banyak
 8. Bagaimana sikap yang dipilih responden, disaat pendapatan kurang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari?
 - a. Mengambil uang dari tabungan
 - b. Menggadaikan barang

- c. Meminjam ke kerabat/ keluarga
- d. Lainnya sebutkan.....

E. Isu-isu Strategis Pemberdayaan Lansia

1. Apakah menurut responden, masyarakat perlu dibantu dalam meningkatkan ekonomi keluarganya?
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Sebaiknya dibantu
 - Belum perlu
2. Jenis bantuan yang dibutuhkan/ diharapkan?
 - a. Bantuan permodalan untuk usaha
 - b. Bantuan peralatan
 - c. Bantuan bahan baku
 - d. Bantuan sarana produksi (bibit, pupuk, obat hama, dll)
 - e. Bantan pemasaran produksi
 - Lainnya sebutkan.....
3. Jenis keterampilan yang dimiliki oleh responden?.
 - a. Pertanian (jenis produk)
 - b. pertukangan
 - c. kerajinan/ industri kecil
 - d. buruh bangunan
 - e. sopir
 - f. peternakan (jenis produk)
 - g. Administrasi
 - Lainnya sebutkan.....
4. Alat produksi apa yang bisa dimanfaatkan oleh responden dan dimiliki oleh keluarga?
 - a. Kendaraan bermotor
 - b. Pekarangan/ sawah/ ladang/ tanah
 - c. Perkakas pertukangan
 - d. Mesin diesel
 - e. Mesin jahit
 - f. Perkakas perbengkelan
 - g. Warung
 - Lainnya sebutkan.....

5. Bila harus diselenggarakan sebuah pelatihan di lingkungan anda/ responden, jenis pelatihan dan keterampilan apa yang paling dibutuhkan saat ini?
 - a. Pertukangan
 - b. Cara bercocoktanam/hidroponik
 - c. Per-bengkelan
 - d. Kursus menjahit/menyulam
 - e. Pemeliharaan dan budidaya ikan lele/ikan hias
 Lainnya sebutkan.....
6. Tantangan terberat apa yang kemungkinan dihadapi responden dalam mengembangkan kegiatan usaha?
 - a. masalah modal
 - b. masalah tenaga kerja
 - c. masalah biaya produksi
 - d. masalah pemasaran
 - e. masalah sarana produksi (lahan, mesin, dll)
 Lainnya sebutkan.....

F. Peran Dan Upaya Pemerintah

1. Kalau pemerintah memberikan bantuan, apa rencana responden?
 - a. Membuka usaha baru
 - b. Mengembangkan usaha yang sudah ada
 Lainnya sebutkan.....
2. Jika membuka usaha, maka jenis usaha seperti apa yang akan ditekuni oleh responden?
 - a. Harus berbeda dengan usaha terdahulu
 - b. Sama dengan usaha yang selama ini ditekuni
 - c. Berbeda tetapi masih satu rumpun usaha
3. Jika pemerintah harus memberikan bantuan, atas dasar apa bantuan itu diberikan?
 - a. Bantuan untuk per-Kepala Keluarga
 - b. Bantuan per-jenis usaha
 - c. Bantuan berdasar jenis kelamin
4. Apabila pemerintah memberikan bantuan, bagaimana menurut responden apakah bantuan tersebut perlu dikembalikan atau tidak?

- a. Tidak perlu dikembalikan
 - b. Perlu dikembalikan dengan bunga relative kecil dan dicicil
 - c. Perlu dikembalikan tanpa bunga dan dicicil
5. Dalam proses pengajuan bantuan, apakah perlu dilakukan model jaminan?
- a. Perlu
 - b. Tidak perlu
6. Dalam pelaksanaan program bantuan baik dari pemerintah maupun non pemerintah apakah perlu dilakukan pendampingan?
- a. Perlu
 - b. Tidak perlu
7. Apabila diperlukan adanya pendampingan berapa lama proses pendampingan itu diperlukan?
- a. 1 bulan
 - b. 2 sampai 3 bulan
 - c. Lebih dari tiga bulan

Surabaya,, 2010

Surveyor : Ttd :

Nama :